



Pemeriksaan Kinerja untuk Ekonomi Hijau

TANTANGAN TERBESAR DALAM PEMERIKSAAN EKONOMI HIJAU, ANTARA LAIN, MENINGKATKAN DAMPAK PEMERIKSAAN, TERUTAMA DI LEVEL *OUTCOME*.



14

Menelusuri
Fraud
dengan
Forensik Digital

25

Ketua BPK
Sampaikan
Apresiasi kepada
NAA Kamboja

36

BPK Selesaikan
Seluruh Tahapan
Pemeriksaan
LKPP Tahun 2022



PENGARAH

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya ikut mendorong peningkatan dampak pemeriksaan kinerja terhadap pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Hal ini antara lain dilakukan dengan menggelar seminar internasional bertajuk "Leveraging the Impact of Performance Audit towards a Green Economy: Multi-Perspectives Regional, National, and International."

Isu ini pun redaksi angkat menjadi salah satu topik utama mengingat pentingnya ekonomi hijau pada saat ini. Seminar pun diharapkan dapat menampung berbagai perspektif maupun pemahaman terkait bagaimana pemeriksaan kinerja memberikan dampak positif terhadap masyarakat utamanya terkait pengembangan ekonomi hijau. Hal ini dengan landasan bahwa *supreme audit institutions* (SAI) memiliki kemampuan untuk memastikan arah gerak pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi hijau.

Penyelenggaraan seminar internasional tersebut berlangsung dari 5-7 Juni 2023 di Jakarta. Tema seminar juga dikaitkan dengan tema Presidensi Indonesia ASEAN 2023 yakni ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.

Berbagai SAI dan berbagai lembaga nasional maupun internasional terkait ekonomi hijau dan pembangunan mengikuti seminar tersebut. Hal itu mulai dari pejabat kementerian/lembaga, perwakilan INTOSAI, INTOSAI Development Initiative (IDI), Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Pusat Energi ASEAN, Pemimpin GPS ASEAN, SDG Center Universitas Padjajaran, serta Kantor Akuntan Ernst and Young.

Satu pembahasan menarik dalam seminar itu yakni bagaimana menghasilkan pemeriksaan kinerja yang berdampak. Dalam pembahasan mencuat bahwa pemeriksaan tidak hanya bisa dilihat dari pelaporan dan tindaklanjutnya. Akan tetapi, pemeriksaan kinerja yang berdampak harus dimulai dari tahap perencanaan.

Isu lain yang redaksi angkat adalah risiko dalam pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu risiko tersebut adalah *computer crime* dalam bentuk akses ilegal ke dalam sistem, pencurian data elektronik, hingga pemalsuan data atau dokumen penting melalui internet. Korupsi dan pencucian uang juga semakin mudah dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyimpan hasil kejahatan (*computer related crime*).

BPK sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi berikut risiko yang dihadapi dalam pemeriksaan. Apalagi ada banyak cara untuk menyembunyikan *fraud*, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi.

Karenanya, pemeriksa perlu menggali tidak hanya bukti konvensional, namun juga bukti nonkonvensional. Seperti bukti elektronik dan/atau bukti digital. Permasalahannya, data digital atau data elektronik bersifat rentan terhadap perubahan/pemusnahan.

Sejalan dengan itu, di rubrik Kolom pun, redaksi menyiapkan tulisan pegawai BPK mengenai pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam penyusunan temuan pemeriksaan BPK.

Di rubrik lain, redaksi menginformasikan bahwa BPK akan menyampaikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Hal ini dilakukan setelah BPK menyelesaikan seluruh tahapan pelaksanaan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022. Untuk tahapan selanjutnya, BPK akan segera menyelesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang akan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

Masih banyak informasi menarik lainnya yang telah redaksi siapkan untuk pembaca sekalian. Selamat menikmati. ~



4 >> Mengungkit Dampak Pemeriksaan Kinerja untuk Ekonomi Hijau

Indonesia telah berupaya mencapai agenda pembangunan global dengan mengintegrasikan target SDGs bersama RPJMN 2020-2024.



14 >> Menelusuri *Fraud* dengan Forensik Digital

BPK sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi berikut risiko yang dihadapi dalam pemeriksaan.



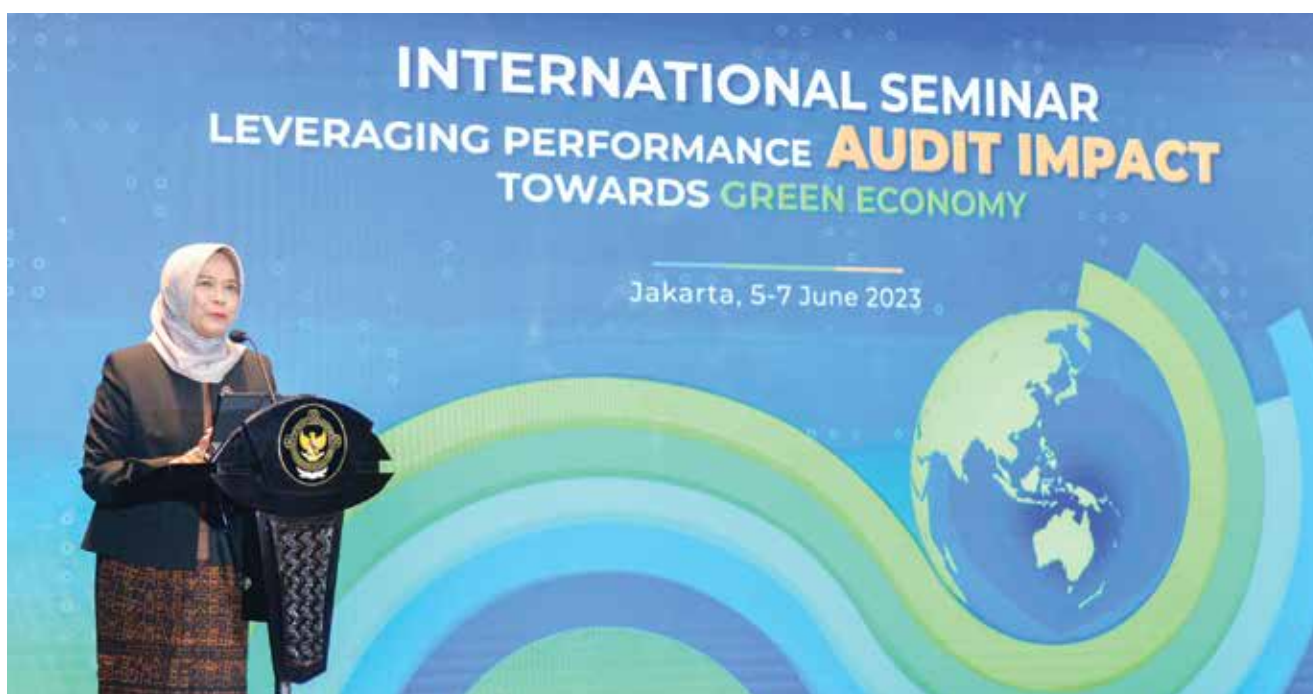
20 >> Mengenal Materialitas untuk Mengetahui Kondisi Keuangan

Materialitas bisa mengidentifikasi risiko salah saji isi laporan keuangan dan juga menentukan, sifat, waktu serta cakupan prosedur audit.

- 25 >> Ketua BPK Sampaikan Apresiasi kepada NAA Kamboja
- 29 >> Wanessa Carvalho Amorim de Mello, Brazilian Federal Court of Account SAI Dapat Bekerja Sama untuk Memperkuat Pemeriksaan Kinerja
- 30 >> Joshua Francis, Senior Director, Performance Audit Service Group ANAO Ajang Berbagi Pengalaman Pemeriksaan Kinerja
- 31 >> Dr Sutthi Suntharanurak, Director of International Cooperation State Audit Office of the Kingdom of Thailand Mendukung Perumusan Kolaborasi Konkret
- 32 >> Ismail Cengiz EREK, Turkish Court of Accounts Bertukar Pengalaman untuk Perbaikan Kualitas Pemeriksaan
- 33 >> Isnaeni Achdiat, Managing Director Government and Public Sector EY Indonesia Consulting Hasil Pemeriksaan Ekonomi Hijau Sangat Ditunggu Masyarakat
- 34 >> Meraih Sukses Lewat Kontrol Diri
- 36 >> BPK Selesaikan Seluruh Tahapan Pemeriksaan LKPP Tahun 2022
- 38 >> Anggota V BPK Tegaskan Bahwa LKPD Berpedoman kepada SPKN
- 39 >> BPK Dorong Penyelesaian Tindak Lanjut oleh Pemprov Kalimantan Selatan
- 40 >> BPK Apresiasi Capaian Positif PLN
- 42 >> Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Penyusunan Temuan Pemeriksaan BPK
- 48 >> Berita Foto

Mengungkit Dampak Pemeriksaan Kinerja untuk Ekonomi Hijau

INDONESIA TELAH BERUPAYA MENCAPAI AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL
DENGAN MENINGTEGRASIKAN TARGET SDGS BERSAMA RPJMN 2020-2024.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan Supreme Audit Institutions (SAI) dinilai dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau. SAI dapat memastikan arah gerak pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mendorong peningkatan dampak pemeriksaan kinerja terhadap pengembangan ekonomi hijau dengan menggelar seminar internasional bertajuk "Leveraging the Impact of Performance Audit towards a Green Economy: Multi-Perspectives Regional, National, and International."

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, seminar ini diharapkan dapat menampung berbagai perspektif maupun pemahaman terkait bagaimana pemeriksaan kinerja memberikan dampak positif terhadap masyarakat utamanya terkait pengembangan ekonomi hijau.

"Sebagai bagian dari masyarakat global, Supreme Audit Institutions (SAI) dapat berperan signifikan dalam memastikan progres dan pencapaian SDGs sejalan dengan mandat masing-masing melalui program pemeriksaan yang relevan," ungkap Isma dalam sambutannya ketika membuka seminar di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Seminar internasional tersebut digelar selama tiga hari di Jakarta dengan menghadirkan berbagai narasumber. Terdapat 14 SAI yang berpartisipasi dalam acara yang juga didukung oleh Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya.

Isma menyampaikan, dalam menyikapi isu yang dibahas dalam seminar diperlukan berbagai pandangan dari semua pihak. Dia menekankan, SAI tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan capaian yang produktif.

"Dengan bekerja bersama, kita bisa memulai perjalanan dalam mengungkit dampak pemeriksaan kinerja menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Penyelenggaraan seminar internasional tersebut berlangsung dari 5-7 Juni 2023 di Jakarta. Tema seminar juga dikaitkan dengan tema Presidensi Indonesia ASEAN 2023 yakni ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.

Berbagai SAI dan berbagai lembaga nasional maupun internasional terkait ekonomi hijau dan pembangunan mengikuti seminar tersebut. Hal itu mulai dari pejabat kementerian/Lembaga, perwakilan INTOSAI, INTOSAI Development Initiative (IDI), Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Pusat Energi ASEAN, Pemimpin GPS ASEAN, SDG Center Universitas Padjajaran, serta Kantor Akuntan Ernst and Young.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, Indonesia telah berupaya mencapai agenda pembangunan global dengan mengintegrasikan target SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait implementasi SDGs di level regional dan nasional.



Dengan bekerja bersama, kita bisa memulai perjalanan dalam mengungkit dampak pemeriksaan kinerja menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Ketua BPK, Isma Yatun



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Rencana strategis SAI perlu memformulasi desain yang jelas dalam mencapai pemeriksaan yang berdampak.

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

BPK pun kemudian telah melaksanakan pemeriksaan terkait SDGs dengan menggunakan empat pendekatan INTOSAI serta panduan yang dikenal sebagai IDI's SDGs Audit Model (ISAM). BPK telah memeriksa kesiapan pemerintah dalam mencapai target SDGs, implementasi SDGs melalui pemeriksaan kinerja untuk tujuan SDGs yang spesifik. Agus menekankan, tantangan terbesar dalam memeriksa implementasi SDGs adalah untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak terutama pada level *outcome*.

Untuk menghasilkan pemeriksaan kinerja yang berdampak, Agus mengatakan, tidak hanya bisa dilihat dari pelaporan dan tindaklanjutnya. Menurutnya, hal itu harus dimulai dari tahap perencanaan.

"Rencana strategis SAI perlu memformulasi desain yang jelas dalam mencapai pemeriksaan yang berdampak," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/ Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan, diskusi dan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperkuat dampak pemeriksaan kinerja terutama untuk pengembangan ekonomi hijau. "Saya sangat setuju bahwa seminar ini perlu dilanjutkan dengan diskusi dan penelitian lebih lanjut serta kemudian mengungkit diskusi dalam seminar yang lebih strategis untuk dampak yang nyata dan efektif," ungkap Achsanul.

Dalam paparannya di seminar tersebut, Achsanul mengungkapkan, kontribusi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja melalui pemeriksaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Achsanul mengatakan, sejak merebaknya Covid-19, seluruh pemerintah di dunia telah membuat upaya *extraordinary* dalam menghadapi virus baru tersebut. Pada saat yang sama, SAI juga menghadapi tantangan berat dalam menjaga kualitas pemeriksaannya.

Di tengah periode sulit tersebut, BPK langsung mengambil langkah strategis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap bisa terjaga dalam penanganan pandemi. BPK menetapkan sejumlah strategi pemeriksaan untuk bisa memeriksa pengelolaan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, dan penanganan bencana.

"Kami melakukan itu tidak hanya sebagai reaksi langsung tapi juga bentuk respons dalam menghadapi krisis kesehatan jangka panjang, pelemahan ekonomi, dan krisis sosial," ujarnya.

Achsanul mengatakan, dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja, SAI kerap menghadapi adanya keterbatasan terkait sumber daya dan waktu. Sehingga, menurut Achsanul, strategi pemeriksaan menjadi faktor penting untuk menentukan wilayah pemeriksaan, tujuan pemeriksaan yang jelas, kriteria, dan indikator yang terukur.

Kemudian, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV/ Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh menyampaikan, pemeriksaan terkait ekonomi hijau sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Haerul menyampaikan, BPK mendapatkan mandat konstitusi untuk melaksanakan pemeriksaan, salah satunya guna mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Seiring upaya pemerintah dalam membangun ekonomi hijau, BPK turut serta mendukung melalui pemeriksaan kinerja dan memberikan rekomendasi. Hal itu guna meningkatkan keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dari program pemerintah.

"Kami telah mendesain pemeriksaan kami agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* yang di dalamnya turut memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan," ungkap Haerul dalam Seminar Internasional bertajuk "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy" di Jakarta, Senin (5/6/2023).



”**Sejak merebaknya Covid-19, seluruh pemerintah di dunia telah membuat upaya extraordinary dalam menghadapi virus baru tersebut. Pada saat yang sama, SAI juga menghadapi tantangan berat dalam menjaga kualitas pemeriksaannya.**

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/ Anggota III BPK, Achsanul Qosasi



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/ Anggota III BPK, Achsanul Qosasi





■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV/ Anggota IV BPK, Haerul Saleh



Kami fokus pada isu relevan dan terkini yang sedang dihadapi publik sembari juga mengidentifikasi area yang memiliki potensi signifikan untuk perbaikan.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV/ Anggota IV BPK, Haerul Saleh

Haerul mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, BPK telah melaksanakan sejumlah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan dalam bidang ekonomi hijau. Terutama, dilakukan pada sektor energi dan kehutanan. Menurut Haerul, pemeriksaan ini krusial karena dua sektor tersebut menjadi kontributor utama terhadap emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan.

Dia menyampaikan, dalam sektor energi, BPK telah memeriksa antara lain pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), pengembangan jaringan gas perkotaan dan SPBG, dan pengadaan infrastruktur kendaraan listrik berbasis baterai untuk mendukung transportasi perkotaan.

"Lewat pemeriksaan ini kami fokus dalam mencapai keseimbangan terkait trilema energi yakni ketahanan energi, ekuitas energi, dan keberlanjutan lingkungan," untkapnya.

Dampak Nyata Pemeriksaan untuk Ekonomi Hijau

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengungkap dampak pemeriksaan kinerja terhadap pembangunan ekonomi hijau. Hal itu menjadi tema dalam seminar internasional yang digelar BPK pada 5-7 Juni 2023.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, BPK perlu mengangkat topik tersebut agar pemeriksaan yang dilakukan bisa semakin memberikan dampak terhadap masyarakat.

"Kita melakukan pemeriksaan tidak hanya untuk menyelesaikan laporan tapi juga rekomendasi yang dibuat dapat memberikan dampak yang nyata," ungkap Yudi kepada *Warta Pemeriksa*.

Yudi menjelaskan, pada saat ini, isu mengenai lingkungan menjadi bahasan strategis baik di tingkat

nasional, regional, dan global. Permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan juga bergerak dinamis sehingga tidak hanya bergantung pada satu sektor.

Sejak pandemi Covid-19, permasalahan juga terus muncul seperti kemampuan dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi maupun gangguan perang. Yudi menekankan, hal itu tidak bisa diselesaikan satu pihak.

"Diperlukan berbagai aktor, dari berbagai organisasi atau berbagai negara agar bersama terlibat. Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana kita menghadapi masalah ini," ujar Yudi.

Dia mengakui, pada masa pandemi, pencapaian SDGs justru mengalami kemunduran. Sehingga, perlu ada terobosan untuk bisa segera bangkit dan mengejar target tersebut. Hal ini, menurut Yudi, menuntut

Sementara dalam sektor kehutanan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan antara lain pengendalian dan manajemen polusi DAS Citarum, implementasi minyak sawit berkelanjutan, dan supervisi dalam perizinan penggunaan area hutan. "Dengan melaksanakan audit ini, kami mencoba untuk memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan," ujarnya.

Terkait tema seminar, Haerul menekankan, dampak dari sebuah pemeriksaan perlu dipikirkan sejak proses perencanaan hingga tindak lanjutnya. Pada proses perencanaan, BPK berupaya selektif dalam memilih topik pemeriksaan.

"Kami fokus pada isu relevan dan terkini yang sedang dihadapi publik sembari juga mengidentifikasi area yang memiliki potensi signifikan untuk perbaikan," ungkapnya.

BPK juga berupaya melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif guna memberikan pandangan menyeluruh terhadap suatu hal. Selain itu, Haerul juga menyampaikan, BPK berupaya mengambil pendekatan lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, dengan menggandeng berbagai *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta, serta para pakar dapat memperkaya rekomendasi pemeriksaan BPK.



Haerul juga menyampaikan pentingnya kolaborasi bersama antara para SAI guna meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan. Dia mengatakan, dengan bersama-sama merancang pemeriksaan yang berdampak terhadap ekonomi hijau dan mampu menjaga konsistensinya maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap SAI.

"Jadi, mari kita bekerja bersama untuk membuat perubahan positif terhadap hajat hidup masyarakat," ujar Haerul. ~

badan pemeriksa atau *supreme audit institution* (SAI) untuk tidak tinggal diam.

"Kita harus menjadi bagian yang memberikan kontribusi secara nyata. Secara mandat, hampir semua SAI itu bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan keuangan sektor publik," ujarnya.

Yudi menyampaikan, tantangan saat ini adalah memberikan penjelasan terkait definisi ekonomi hijau. Dalam tiga hari seminar, BPK bersama SAI dan mitra pembangunan lainnya mendiskusikan persepsi maupun pemahaman terkait ekonomi hijau.

"Kita ingin melihat seberapa jauh mandat audit pemeriksaan itu bisa berkontribusi terhadap ekonomi hijau," ujarnya.

Dalam acara seminar internasional itu, Bank Dunia (World Bank) turut memberikan dukungan. Selain itu, terdapat 14 SAI dari berbagai belahan dunia ikut serta baik melalui metode virtual atau hadir langsung.

Menurut Yudi, dari langkah awal ini diharapkan dapat lahir kerangka awal dalam pemeriksaan kinerja. "Ini adalah tahap awal bagaimana kita bisa mengungkit

pemeriksaan yang sudah biasa kita lakukan. Pemeriksaan yang kita lakukan sudah benar tapi bagaimana cara kita bisa mengungkit dampak dari pemeriksaan kinerja itu," ujarnya.

BPK juga dapat membagikan pengalaman memeriksa pencapaian SDGs kepada masyarakat. BPK juga telah memberikan rekomendasi untuk memperbaiki upaya pencapaian SDGs.

Secara kelembagaan, Renstra BPK juga sudah memasukkan RPJMN sebagai referensi untuk merancang audit dalam lima tahun pemerintahan.

"Ini sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga, dengan demikian BPK sudah punya langkah dasar atau *baseline* yang bagus bagaimana mengaudit yang sifatnya *long term*," ujarnya.

Selain itu, BPK juga pernah beberapa kali melakukan pemeriksaan terkait ekonomi hijau atau lingkungan. Hal itu seperti isu transportasi berkelanjutan, transisi energi, dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Kita akan terus lihat seberapa jauh rekomendasi ini bisa ikut berdampak ke depan," ujarnya. ~

BPK Terus Kawal Transisi Energi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi hijau. Kepala Auditorat IVB Pemut Aryo Wibowo mengatakan, pihaknya belum lama ini telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan transisi energi.

Pemut menjelaskan, Auditorat VIB membidangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia mengatakan, kedua sektor tersebut sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mengingat sektor energi merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Adapun sektor kehutanan merupakan sektor yang penting dalam penyerapan gas rumah kaca di atmosfer dan mendukung pelestarian lingkungan.

"Baru-baru ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan transisi energi. Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai upaya pemerintah dalam pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi," kata Pemut.

Fokus dari pemeriksaan tersebut tidak hanya bagaimana menjadikan sektor energi lebih bersih dan rendah emisi, tapi juga bagaimana mengelola sumber daya energi dengan lebih efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemut menjelaskan, hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, yaitu pengelolaan energi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi harus rendah karbon, efisien, dan inklusif secara



sosial. Pemeriksaan tersebut juga memasukkan aspek *foresight* untuk memperhitungkan implikasi masa depan dari kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan.

"Selain itu, beberapa pemeriksaan terkait lingkungan dan ekonomi hijau juga telah dilakukan BPK dalam lima tahun terakhir," kata Pemut.

Pemeriksaan tersebut, antara lain, pemeriksaan kinerja atas energi baru terbarukan, pemeriksaan kinerja atas jaringan gas rumah tangga, pemeriksaan kinerja atas transportasi perkotaan berkelanjutan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perizinan kehutanan, dan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan limbah B3.

Pada semester II tahun ini, BPK pun akan melaksanakan pemeriksaan terkait pembangunan lingkungan, yaitu antara lain pemeriksaan kinerja penyediaan energi bersih dan terjangkau dan pemeriksaan kinerja aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pencapaian atas tujuan-tujuan negara yang terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, beberapa referensi yang dijadikan sebagai rujukan, antara lain, *best practices* internasional, perjanjian dan tujuan global, serta hasil *benchmarking* pada negara-negara yang telah sukses menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan. "Hasil pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," kata Pemut. ~

Meningkatkan Dampak Pemeriksaan Kinerja

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja agar memiliki dampak pada perbaikan entitas yang diperiksa. Menurut Kasubdit Litbang Pemeriksaan Kinerja BPK Fauzan Yudo Wibowo, ada beberapa hal yang selalu diperhatikan BPK setiap kali melakukan pemeriksaan kinerja.

Fauzan menjelaskan, BPK memiliki pedoman pemeriksaan kinerja berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja. Petunjuk itu telah mengacu kepada International Standard of Supreme Audit Institutions terutama ISSAI 300 Performance Audit Principles, ISSAI 3000 Performance Audit Standard beserta *guidance* yang terkait.

"Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan tahun 2020 tersebut telah menunjang upaya pemeriksaan kinerja dalam meningkatkan dampak pemeriksaan," kata Fauzan kepada *Warta Pemeriksa*.

Fauzan menjelaskan, peningkatan dampak pemeriksaan itu dapat diraih melalui beberapa hal:

1. Pemilihan topik potensial.

Pada tahap ini penentuan topik potensial untuk selanjutnya diperiksa dilakukan melalui pertimbangan beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan, entitas/program yang melibatkan hajat hidup orang banyak atau menyangkut pelayanan publik dan menjadi perhatian lembaga perwakilan maupun publik, dapat diprioritaskan menjadi topik pemeriksaan. "Sehingga pemeriksaan yang dilakukan memberikan nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat/publik," katanya.

Hal selanjutnya adalah mengenai permasalahan atas topik. Fauzan menjelaskan, semakin tinggi permasalahan atas topik semakin tinggi prioritas untuk dipilih. Hal ini bertujuan untuk mendorong perbaikan guna meningkatkan kinerja entitas yang

diperiksa, sehingga dampak pemeriksaan yang diberikan akan semakin optimal.

Dengan kedua pertimbangan tersebut diharapkan topik potensial yang terpilih memiliki dampak yang besar bagi perbaikan pelayanan publik secara optimal.

2. Penetapan Area Kunci

Pada tahap ini, area potensial yang ada akan dipilih menjadi area kunci yang nantinya menjadi fokus pemeriksaan kinerja. Penentuan area kunci ini menggunakan metode RIAS yaitu Risiko Manajemen (R), Dampak (I), Auditabilitas (A) dan Signifikansi (S).

Dari unsur pertimbangan signifikansi, kriteria yang digunakan salah satunya adalah visibilitas yaitu penilaian suatu area menjadi perhatian/sorotan lembaga perwakilan dan atau masyarakat. Area yang memiliki visibilitas tinggi, berarti area tersebut memiliki dampak signifikan bagi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Kemudian, kriteria penentuan area kunci berikutnya adalah Dampak/Impact yaitu besarnya dampak perbaikan dan manfaat yang dapat diberikan melalui pemeriksaan. Melalui kedua hal kriteria penentuan tersebut, diharapkan area kunci yang terpilih untuk menjadi fokus pemeriksaan memiliki dampak yang besar pula untuk perbaikan pelayanan publik.

3. Penentuan rekomendasi hasil pemeriksaan

Dalam penetapan rekomendasi hasil pemeriksaan perlu diperhatikan bahwa suatu rekomendasi akan bersifat konstruktif dan berguna apabila diantaranya memberikan nilai tambah

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Fauzan menjelaskan, salah satu tujuan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah menentukan dampak hasil pemeriksaan. Jika melalui penelaahan terdapat ketidakcukupan atau ketidakpuasan terhadap Pelaksanaan rekomendasi termasuk diantaranya ingin mengetahui progres/dampak atas rekomendasi yang diberikan, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut.

Fauzan menambahkan, hasil publikasi IDI yaitu *Facilitating Audit Impact (FAI) Strategy 2020–2023* bertujuan untuk meningkatkan dampak pemeriksaan melalui tiga upaya dalam kerangka penguatan dampak pemeriksaan, yaitu:

- a. penerapan pemeriksaan yang didasarkan pada dampak pemeriksaan (*Impact Driven Audit*).
- b. penerapan sistem pemantauan tindak lanjut (*robust follow-up system*).
- c. penguatan upaya koalisi dengan pemangku kepentingan (*strong stakeholder coalition*).

Adapun Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja sejalan dengan strategi peningkatan dampak pemeriksaan sesuai dengan *FAI Strategy* tersebut, yaitu:

- a. Penerapan pemeriksaan berdasarkan dampak (*impact driven audit*) melalui pemilihan topik potensial, penentuan area kunci dan penetapan rekomendasi hasil pemeriksaan
- b. Penerapan sistem pemantauan tindak lanjut yang handal (*robust follow up system*) melalui pemantauan tindak lanjut yang mengukur dampak serta penerapan pemeriksaan tindak lanjut sebagai upaya memastikan dampak pemeriksaan dampak tercapai.
- c. Penguatan upaya kerjasama dengan pemangku kepentingan juga ditekankan dalam *Juklak Pemeriksaan Kinerja* melalui upaya komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan terkait aspek-aspek utama dalam pemeriksaan, baik dengan entitas yang diperiksa maupun dengan pemangku kepentingan yang relevan.

Selain itu *Juklak Pemeriksaan Kinerja* juga menekankan pelibatan pemangku kepentingan pada saat seluruh tahap pemeriksaan yaitu pada tahap:

- 1) Pemahaman awal objek pemeriksaan/ hal pokok melalui Focus Group Discussion dengan beberapa pihak termasuk pemangku kepentingan.
- 2) Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penetapan topik potensial melalui hasil survei dengan pemangku kepentingan mengenai topik yang layak untuk diusulkan menjadi topik pemeriksaan kinerja

- 3) Mitigasi Risiko atas kesulitan dalam menentukan kriteria yang tepat, antara lain Pemeriksa dapat melibatkan ahli dan pemangku kepentingan yang kompeten apabila terdapat pertentangan antar kriteria dan/atau tidak tersedianya kriteria yang tepat.
- 4) Pertimbangan dalam merumuskan tujuan pemeriksaan juga melibatkan pemangku kepentingan melalui pertimbangan isu atau risiko signifikan yang dihadapi hal pokok yang diperiksa serta nilai tambah yang dapat diberikan dari pemeriksaan tersebut
- 5) Wawancara dengan pemangku kepentingan pada tahap Pelaksanaan untuk meningkatkan validitas dan mendapatkan berbagai sudut pandang yang memperkaya bukti pemeriksaan
- 6) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pemangku kepentingan yang disertai pemaparan hasil pemeriksaan dan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Melalui penerapan *Juklak Pemeriksaan Kinerja* secara memadai maka upaya pencapaian dampak pemeriksaan yang memberikan perbaikan optimal bagi pelayanan public sekaligus meningkatkan relevansi BPK dalam meningkatkan nilai dan manfaat (*value and benefit*) kepada masyarakat akan mudah tercapai.

"Dengan demikian, pedoman BPK dapat menjadi dasar yang memadai untuk memberikan masukan yang berguna bagi materi pelaksanaan seminar dengan sekaligus memberikan dasar pelaksanaan pemeriksaan BPK untuk mencapai kontribusi dan meningkatkan dampak perbaikan pelayanan publik yang optimal di masa depan dan dapat menjadi acuan bagi SAI lain."

Seperti diketahui, BPK pada 5-7 Juni 2023 menggelar seminar internasional bertema "*Leveraging Performance Audit Impact towards Green Economy*" dengan dukungan Public Financial Management-Bank Dunia.

Seminar tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan wawasan untuk peningkatan dampak pemeriksaan kinerja khususnya pada ekonomi hijau melalui *knowledge sharing* dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. ~



@bpkriofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



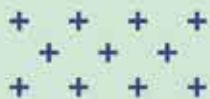
08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



MENELU SURTI

Fraud

dengan
Forensik
Digital



BPK SANGAT MENARUH PERHATIAN TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERIKUT RISIKO YANG DIHADAPI DALAM PEMERIKSAAN.

Pemanfaatan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, tak terkecuali di sektor publik atau pemerintahan. Pengelolaan data keuangan negara oleh pemerintah bergeser dari data konvensional berbentuk dokumen kertas menjadi dokumen digital. Meski mempermudah pengolahan data, pemanfaatan teknologi informasi memunculkan banyak risiko.

Auditor Utama Investigasi Hery Subowo menjelaskan, salah satu risiko tersebut adalah *computer crime* dalam bentuk akses ilegal ke dalam sistem, pencurian data elektronik, hingga pemalsuan data atau dokumen penting melalui internet. "Selain itu, korupsi dan pencucian uang semakin mudah dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyimpan hasil kejahatan (*computer related crime*)," kata Hery kepada *Warta Pemeriksa*.

Hery menegaskan, BPK sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi berikut risiko yang dihadapi dalam pemeriksaan. "Kita tahu bahwa *fraud is hidden*. Ada banyak cara untuk menyembunyikan *fraud* termasuk dengan menggunakan teknologi informasi," katanya.

Oleh karena itu, pemeriksa perlu menggali tidak hanya bukti konvensional, tetapi juga bukti non-konvensional seperti bukti elektronik dan/atau bukti digital. Permasalahannya, data digital atau data elektronik bersifat rentan terhadap perubahan/pemusnahan.

Maka, penanganan atas bukti tersebut harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk menjaga integritas bukti digital, sesuai dengan *international best practices*. Untuk itulah BPK perlu menerapkan teknik pemeriksaan dengan menggunakan keahlian forensik digital.

Hery menjelaskan, forensik digital merupakan cabang ilmu forensik yang fokus pada investigasi dan pengungkapan bukti digital untuk membantu dalam pemeriksaan suatu kejadian atau insiden. Lingkup forensik digital mulai dari identifikasi,



koleksi, akuisisi, preservasi, analisis, interpretasi, hingga pelaporan pemberian keterangan ahli.

Dalam forensik digital, pemeriksa terlebih dahulu menentukan bukti digital apa yang akan menjadi target dan prosedur apa yang relevan untuk menangani bukti tersebut. Setelah itu, perangkat yang memuat bukti digital tersebut dilepas dari lokasi aslinya untuk dilakukan akuisisi dan analisis.

Selanjutnya, bukti digital diamankan untuk melindungi integritas bukti dan memastikan kebermanfaatannya dalam investigasi. Akuisisi menghasilkan salinan bukti digital serta dokumentasi atas metode yang digunakan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Setelah itu, pemeriksa mencari, mengungkap, dan mengekstraksi serta menginterpretasikan bukti digital yang relevan dengan indikasi kasus yang sedang diinvestigasi.

Informasi yang diperoleh dari analisis dan eksaminasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang terstruktur, objektif, dan terperinci, untuk disampaikan kepada pihak yang meminta. Pemeriksa juga dapat memberikan keterangan mengenai hasil forensik digital dalam proses penyidikan dan/atau peradilan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang.



■ Hery Subowo

”**Jadi, BPK dapat menerapkan forensik digital untuk memperoleh, menganalisis dan mengevaluasi bukti digital/elektronis. Penerapan ini akan menghasilkan bukti audit yang dapat mendukung alat bukti hukum yang sah dalam hukum acara di Indonesia. Tentunya hal ini bisa diimplementasikan jika digunakan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.**

Hery menegaskan, BPK dan pemeriksa BPK memiliki kewenangan yang kuat dalam melaksanakan forensik digital. Kewenangan itu ditegaskan dalam

UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pasal 10 beleid tersebut dijelaskan, pemeriksa dapat mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

Kemudian, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017, khususnya Kerangka Konseptual di Paragraf 37, mempertegas bahwa bentuk bukti pemeriksaan bisa bermacam-macam, antara lain transaksi elektronik, dan komunikasi elektronik dengan pihak di luar entitas yang diperiksa. “Metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti pun beragam sesuai kebutuhan dan kewenangan pemeriksa,” ujar Hery.

Pengaturan ini memberi opsi untuk pemerolehan bukti digital/elektronik melalui penerapan forensik digital.

Di antara jenis pemeriksaan di BPK yang memerlukan forensik digital adalah pemeriksaan investigatif (PI) termasuk penghitungan kerugian negara (PKN). Penerapan forensik digital dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan pembuktian di persidangan.

Bukti dalam PI dan PKN perlu dipersiapkan untuk menjadi atau diselaraskan dengan alat bukti hukum. Dalam hal ini terkait alat bukti hukum digital/elektronis telah diatur dalam UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

“Jadi, BPK dapat menerapkan forensik digital untuk memperoleh, menganalisis dan mengevaluasi bukti digital/elektronis. Penerapan ini akan menghasilkan bukti audit yang dapat mendukung alat bukti hukum yang sah dalam hukum acara di Indonesia. Tentunya hal ini bisa diimplementasikan jika digunakan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya,” kata Hery.

KONTRIBUSI FORENSIK DIGITAL

Hery menjelaskan, penerapan forensik digital di BPK sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2015. Pada saat itu, forensik digital sudah mulai diterapkan oleh auditor yang menguasai metodologi dengan peralatan yang masih sangat terbatas. Kemudian pada saat awal terbentuknya Auditorat Utama Investigasi (AUI) 2017-2018, laboratorium forensik digital mulai dibangun. Forensik digital mulai diterapkan untuk mendukung pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara di AUI.

Setelah itu, pada 2019 hingga 2020 berbagai perangkat lunak terkait forensik digital disiapkan dan pada saat itulah forensik digital mulai meningkat frekuensinya di AUI. Kontribusi forensik

digital menjadi sangat signifikan dalam menunjang keberhasilan Pemeriksaan investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara.

Dia menjelaskan, PI/PKN pada kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri juga sudah memanfaatkan forensik digital tersebut. Karena kontribusi signifikan itulah AUI secara intensif berupaya terus meningkatkan kapasitas forensik digital. Untuk SDM auditor AUI melakukannya melalui diklat, focus group discussion (FGD) atau knowledge transfer forum (KTF).

Selain itu, sarpras dan peralatan juga terus ditingkatkan. Panduan pelaksanaan forensik digital juga telah disusun dan disempurnakan. Saat ini, BPK telah memiliki *task force* untuk pengelolaan laboratorium forensik digital dibawah AUI.

AKREDITASI LABDIGIFOR

Hery menambahkan, BPK pada tahun ini berencana untuk mengajukan akreditasi Laboratorium Forensik Digital (Labdigifor) BPK ke Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Akreditasi Laboratorium Forensik Digital merupakan implementasi dari Renstra BPK 2020-2024.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif, BPK mengembangkan Inisiatif Strategis (IS), antara lain, Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi melalui Pengembangan Sistem Pencegahan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara.

Salah satu program dalam IS tersebut adalah Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Investigatif melalui Penyempurnaan Laboratorium Forensik Digital di BPK. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan melalui akreditasi kelembagaan, pembaruan lisensi perangkat, penambahan sertifikasi auditor, peningkatan sarana prasarana serta penyempurnaan metodologi forensik digital.

Hery mengatakan, kegiatan forensik digital di BPK perlu dilakukan untuk memastikan penerapan *best practice* dan standar Forensik Digital. Standar yang harus dipatuhi seperti ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, ISO/IEC 27037:2012 Petunjuk Identifikasi, Koleksi, Akuisisi, dan Preservasi Bukti Digital, dan ISO/IEC 27043/2015 tentang Teknologi Informasi- Teknik Keamanan- Prinsip dan Investigasi Insiden.

"Akreditasi nantinya akan memastikan bahwa laboratorium forensik digital BPK RI *comply* dengan standar tata kelola sehingga menjamin mutu, keandalan, dan kompetensi dari layanan labdigifor BPK," ujar Hery.

Hery menambahkan, output forensik digital yang terakreditasi akan memberikan nilai tambah dalam pengungkapan suatu kasus yang akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK. Pada akhirnya, kepercayaan pengguna jasa juga akan lebih meningkat atas hasil pengujian Labdigifor BPK.



Terkait persiapan akreditasi Labdigifor, BPK saat ini telah memiliki ruangan laboratorium yang cukup representatif. Ruangan ini memfasilitasi alur proses penanganan barang bukti dari penerimaan (*reception*), pembongkaran (*disassemble*), akuisisi (*processing*) hingga dilakukan analisa (*analysis*). Di sini juga dibedakan penanganan jenis barang bukti yang berbentuk computer (PC) dan gadget.

Di samping itu, ruangan ini juga meningkatkan keamanan berlapis sejak *reception room* hingga ruang khusus untuk menyimpan barang bukti (*evidence storage*) dan perangkat forensik digital (*tool storage*). Untuk mempermudah koordinasi, penanganan Labdigifor juga dilengkapi dengan *meeting and presentation area*.

"Kami juga sedang mengembangkan Laboratorium Management Information System untuk membantu administrasi barang bukti, pengelolaan perangkat, serta penatausahaan hasil output yang lebih akuntabel dan mudah ditelusuri," kata dia.

Pada akhir Februari 2023, kata dia, Labdigifor BPK RI juga telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI). "Alhamdulillah, hasil unjuk kerja laboratorium forensik digital BPK RI pada bidang komputer dan handphone mendapat predikat sangat baik. Kami juga sudah menyelesaikan audit internal untuk mengevaluasi kesesuaian SOP dengan standar ISO dan kepatuhan terhadap SOP tersebut dalam pengelolaan Labdigifor," katanya.

Dalam mengembangkan lab forensik digital, BPK bekerja sama dengan praktisi dan akademisi forensik digital dari Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII, dan Puslabfor Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu, BPK bekerja sama dengan Laboratorium Forensik Digital Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Badan Standarisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional.

"Auditor kami juga menjadi member aktif di Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI). Kerja sama tersebut dalam bentuk FGD, KTF, dan *In House Training* dengan berbagai pakar dan praktisi serta Studi Banding dan Benchmarking ke Laboratorium Forensik Digital pada Institusi lain," ujar Hery.

Saat ini, Labdigifor BPK RI masih fokus pada pemenuhan permintaan layanan pengujian dari internal BPK RI, baik untuk keperluan mendukung pemeriksaan investigatif maupun tugas lainnya. Jumlah personel labdigifor saat ini masih terbatas, sehingga tidak akan mampu melayani seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Sehingga,



pemenuhan layanan sesuai dengan skala prioritas, urgensi, dan kebutuhan.

"Ke depan nanti dengan perolehan akreditasi labdigifor, kami juga berencana untuk melayani pihak di luar BPK. Untuk itu kami sedang berupaya memperbanyak personel labdigifor baru yang memiliki *passion* dan *skill* di bidang digifor," ujarnya.

Untuk menjaring talenta melalui pengenalan forensik digital, auditor AUI secara rutin memberikan *sharing session* dalam KTF atau menjadi narasumber dalam diklat teknis terkait pemanfaatan forensik digital dalam pemeriksaan BPK.

Hery mengatakan, meskipun nanti Labdigifor BPK telah memiliki personel, peralatan, dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan forensik digital, BPK tidak boleh cepat berpuas diri. BPK harus selalu melakukan dan *continuous improvement* mengikuti perkembangan teknologi.

Sebab, pengelolaan Labdigifor yang terakreditasi memerlukan dukungan sumber daya baik infrastruktur dan personel, serta tata kelola organisasi.

Dia menambahkan, *software* maupun *hardware* forensik digital perlu diperbarui secara berkala agar tetap dapat menangani produk/teknologi versi terkini. Selain itu, personel harus terus melakukan riset, pendidikan dan pelatihan terkait forensik digital yang terus berkembang.

Organisasi labdigifor pun harus *agile* dan tidak kaku mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Harapan saya, tugas pokok dan fungsi pelaksanaan forensik digital dapat diakomodir dalam struktur organisasi BPK yang definitif.

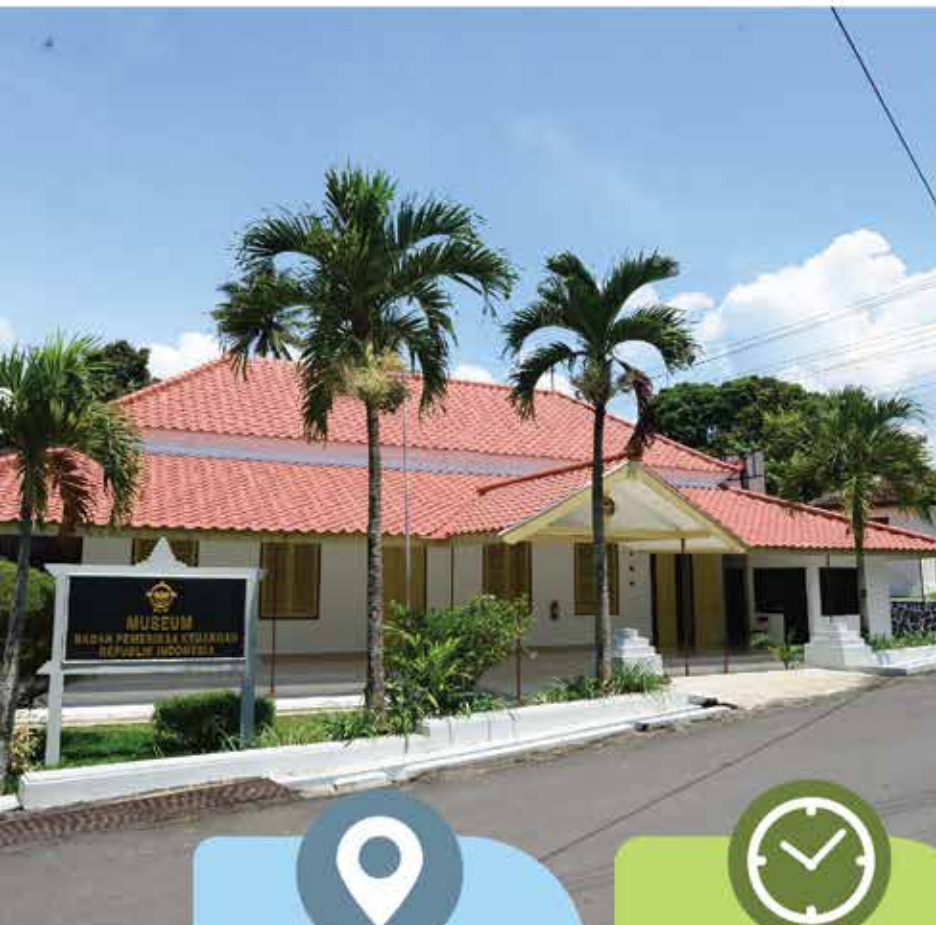
"Untuk itu kami juga harus terus meningkatkan komunikasi, koordinasi sinergi, dan kolaborasi dengan stakeholder baik di internal BPK maupun pengguna layanan digifor eksternal, agar proses akreditasi ini berjalan lancar dan sukses." ~



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No 1, Magelang



Buka:

Selasa - Minggu
09:00-15:00



(0293) 310230



museum.bpk.go.id



[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi
di berbagai ruangan menarik



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)

Mengenal Materialitas untuk Mengetahui Kondisi Keuangan

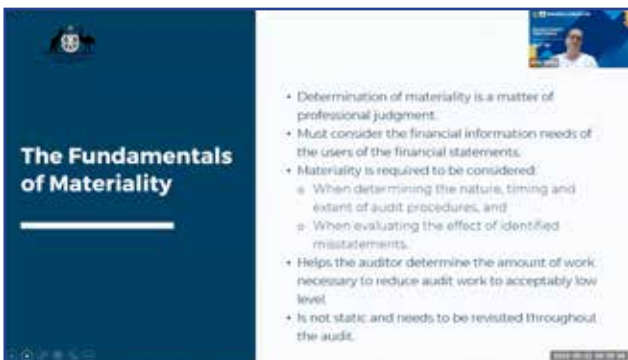
MATERIALITAS BISA MENGIDENTIFIKASI RISIKO SALAH SAJI ISI LAPORAN KEUANGAN DAN JUGA MENENTUKAN, SIFAT, WAKTU SERTA CAKUPAN PROSEDUR AUDIT.



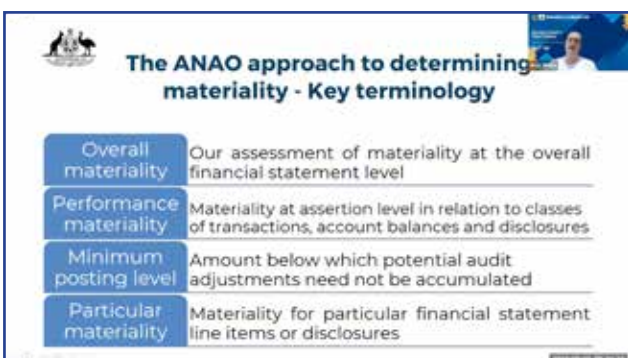
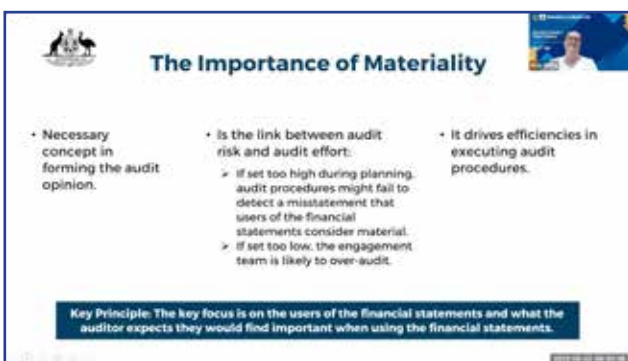
Komunitas Litbang Live kembali menggelar diskusi pada Mei. Kali ini, tema yang diangkat adalah "Materiality in The Audit of Financial Statements" yang mengundang tamu dari Australian National Audit Office (ANAO). Perwakilan ANAO, yaitu Executive Director Kristian Gage, Financial Statement Auditor Jessica Totentino dan Audit Principal ANAO Amy Wicks, menjelaskan materialitas dari perspektif dan aturan yang dimiliki serta tantangan yang harus dihadapi lembaganya.

"Materialitas adalah konsep paling fundamental, yang juga memiliki standar dari lembaga dunia, sehingga kami berharap ada berbagai persamaan dan tantangan yang bisa dipelajari bersama," ucap Audit Principal ANAO Amy Wicks.

Amy Wicks menjelaskan, berdasarkan aturan dan pandangan ANAO, sesuai dengan Australian Auditing Standard (ASA 320), materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan memberikan panduan khusus tentang penerapan materialitas untuk audit sektor publik.



Materialitas adalah konsep paling fundamental, yang juga memiliki standar dari lembaga dunia, sehingga kami berharap ada berbagai persamaan dan tantangan yang bisa dipelajari bersama.



Lalu, sebenarnya apa itu materialitas?

Menurut Jessica Tolentino, materialitas digunakan atau dipertimbangkan saat merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk mengurangi risiko pemeriksaan di level yang masih bisa diterima. Oleh karenanya, materialitas digunakan untuk menentukan sifat, waktu dan cakupan prosedur penilaian risiko.

Selain itu, materialitas bisa mengidentifikasi risiko salah saji isi dalam laporan keuangan dan juga menentukan, sifat, waktu dan cakupan prosedur audit ke depannya.

"Seperti yang sudah kami sampaikan, materialitas bisa digunakan, saat memulai pemeriksaan, dan dalam pemeriksaan lebih lanjut, apakah masih relevan dalam pemeriksaan itu sendiri," ucap Jessica.

Materialitas, tutur dia, selalu berubah mengikuti proses bisnis. Sehingga patut diingat bahwa auditor tidak menghitung seluruh data dari nol seluruh laporan dari aktivitas keuangan (*financial statements*), namun juga menentukan sifat, waktu dan cakupan prosedur penilaian risiko.

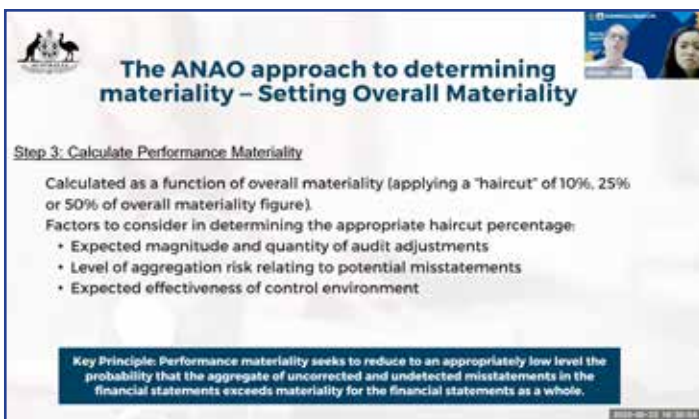
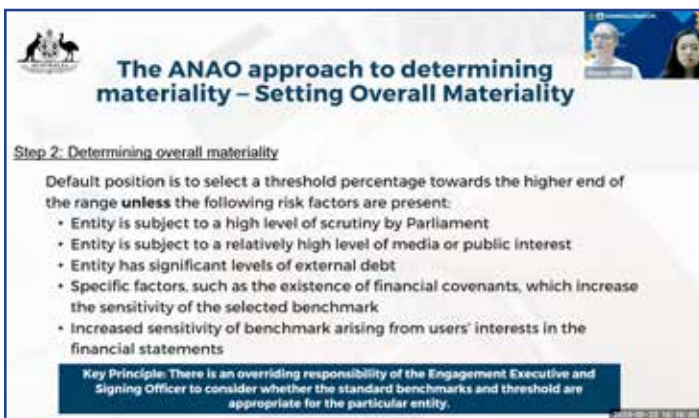
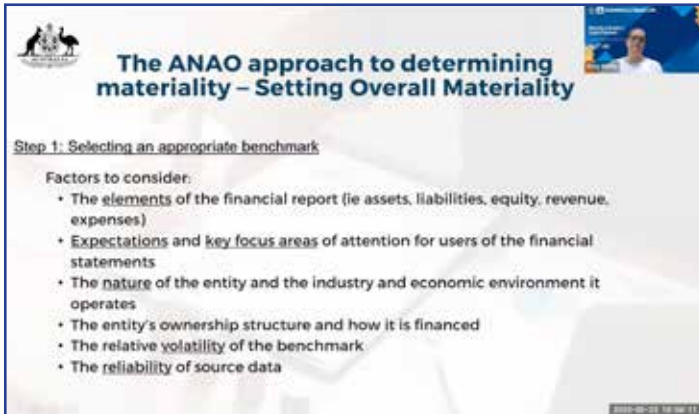
Satu hal yang ia garisbawahi, penentuan materialitas berdasarkan pertimbangan profesional. Hal itu harus mempertimbangkan kebutuhan informasi keuangan, orang-orang yang membutuhkan laporan keuangan.

Materialitas juga bisa menjadi pertimbangan ketika menentukan sifat, waktu dan cakupan prosedur audit dan ketika mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang bisa diidentifikasi.

"Materialitas membantu pemeriksa atau auditor menentukan apa saja yang harus dikerjakan, untuk mengurangi pemeriksaan yang tak perlu. Materialitas itu tidak absolut sehingga perlu ditinjau sepanjang proses audit," tutur dia.

Ada sejumlah terminologi kunci terkait materialitas. Pertama adalah *overall materiality*. Ini adalah penilaian materialitas berdasarkan laporan keuangan keseluruhan. Kedua, *performance materiality*, yaitu materialitas berdasar level asersi, yang terkait penggolongan transaksi, saldo dan pengungkapan.

Kemudian, adalah *minimum posting level*. Ini adalah jumlah angka di bawah dimana penyesuaian audit tidak perlu diakumulasikan. Adapun yang terakhir adalah *particular materiality*, yaitu materialitas untuk item atau pengungkapan pernyataan.



Jessica menjelaskan *overall materiality* dibutuhkan untuk informasi pengguna laporan keuangan. Bagi ANAO, parlemen jadi lembaga publik utama yang menerima laporan keuangan. Alasannya, laporan keuangan bisa memberikan dasar bagi anggota parlemen untuk memantau pemerintah dan lembaga eksekutif lainnya untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatannya.

Laporan keuangan juga dapat digunakan pemerintah untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Sehingga, *overall materiality* amat dipengaruhi oleh persepsi ANAO tentang informasi yang dibutuhkan parlemen terkait kegiatan pemerintah.

Secara umum, *overall materiality* menjadi tolok ukur dalam laporan keuangan secara keseluruhan dan menjadi dasar *performance materiality*. Selain itu, faktor risiko yang terkait dengan sifat entitas bukan bagian dari risiko audit. *Overall materiality* juga dihitung berdasarkan persentase dari angka patokan yang dipilih.

Amy Wicks menambahkan, ada tiga hal penting mengapa materialitas patut diperhatikan. Pertama, materialitas diperlukan dalam membentuk opini pemeriksaan. Kemudian Kedua, menjadi penghubung antara *audit risk* dan *audit effort*.

"Jadi jika terlalu tinggi selama masa perencanaan, maka prosedur pemeriksaan tidak akan mampu mendeteksi salah saji material pengguna laporan keuangan. Jika ditetapkan terlalu rendah, *engagement team* kemungkinan besar akan melakukan pemeriksaan secara berlebihan," ucap dia.





Terakhir, yang paling penting materialitas bisa mendorong efisiensi dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan. ANAO, ungkap Amy, memiliki pendekatan sendiri untuk menentukan materialitas. Pendekatan ini tentu sesuai dengan standar atau aturan pemeriksaan yang dimiliki ANAO.

Ada tingkatan pendekatan materialitas, yaitu *overall materiality*, *performance materiality*, dan *particular materiality*. Selain itu, pendekatan yang berdasarkan pertimbangan profesional dalam menilai materialitas harus terdokumentasi.

Aturan lainnya, yang boleh menyetujui adalah Kepala Pemeriksaan (Executive Engagement). Sementara bila ada pejabat yang bertanggung jawab namun di luar *engagement team*, maka ia juga diwajibkan untuk menyetujui material tersebut.

la mencontohkan, apabila dirinya menjadi Engagement Executive, maka kepala pemeriksaan meminta auditor senior dan junior untuk menghitung dan menyusun materialitas. Bila dirasa sudah tepat, maka baru bisa disetujui oleh Engagement Executive. Selain itu juga wajib disetujui pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan.

"Ini jadi elemen kunci sebagai penghubung antara materialitas dan opini auditor," tutur dia. ~



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Ketua BPK Sampaikan Apresiasi kepada NAA Kamboja

PERTEMUAN INI MERUPAKAN BAGIAN DARI IMPLEMENTASI KERJA SAMA BILATERAL ANTARA KEDUA LEMBAGA PEMERIKSA ATAU SUPREME AUDIT INSTITUTION (SAI).



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama bilateral yang telah terjalin dengan the National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia (NAA). Tercatat, BPK dan NAA telah menjalin kerja sama sejak 2010.

Berbagai aktivitas telah diselenggarakan sebagai implementasi kerja sama. Mulai dari pelatihan dan seminar bilateral dengan berbagai topik, seperti audit investigasi, audit kinerja, manajemen pelatihan, audit lingkungan dan topik penting lainnya.

Apresiasi itu disampaikan Ketua BPK pada pertemuan bilateral dengan Auditor General of the NAA, Som Kim Suor, di Phnom Penh, Kamboja, Senin (8/5/2023). Pertemuan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral antara kedua lembaga pemeriksa atau *supreme audit institution* (SAI).

Selain itu, Ketua BPK juga mengapresiasi kesuksesan Kamboja sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) ke-32. "Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi atas kerja sama bilateral yang terjalin antara National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia dan BPK RI," ungkap Ketua BPK.

Pada kesempatan ini, Auditor General NAA menyampaikan bahwa Kamboja merasa terhormat menjadi penyelenggara SEA Games 2023.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

— Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi atas kerja sama bilateral yang terjalin antara National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia dan BPK RI.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini Kamboja mengalami perkembangan ekonomi yang cukup baik. Meskipun sebelumnya kondisi di negara tersebut sempat menurun akibat pandemi Covid-19 seperti dialami negara-negara lainnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi atas bantuan BPK kepada NAA dalam hal pengembangan kapasitas pemeriksaan melalui berbagai *training* dan *knowledge sharing*. Dia berharap agar pada masa yang akan datang BPK dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam hal tindak lanjut pemeriksaan, manajemen diklat, dan pemeriksaan berbasis teknologi informasi (*IT audit*).

Setelah pertemuan tersebut, BPK melanjutkan kegiatan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyusunan panduan tindak lanjut. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Yuan Candra Djaisin.


Pertemuan ini diharapkan menjadi *milestone* penting untuk keberlangsungan kerja sama bilateral dan hubungan yang lebih erat di antara kedua institusi. Khususnya dalam menjawab berbagai isu dan tantangan di bidang pemeriksaan sektor publik. ~



Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**





Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy". Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada 5-7 Juni 2023 juga berhasil mendatangkan sejumlah perwakilan supreme audit institution (SAI) dari berbagai belahan dunia. Tak hanya itu, akademisi dan pemangku kepentingan lain turut memberikan masukan sehingga forum diskusi itu bisa memberikan masukan penting dalam pengembangan pemeriksaan kinerja ke depan. Berikut ini adalah pandangan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan seminar tersebut.

Wanessa Carvalho Amorim de Mello

Brazilian Federal Court of Account

SAI Dapat Bekerja Sama untuk Memperkuat Pemeriksaan Kinerja

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy" di Jakarta pada 5-7 Juni 2023. Perwakilan dari Brazilian Federal Court of Account Wanessa Carvalho Amorim de Mello mengatakan, seminar internasional yang digelar atas kerja sama dengan Bank Dunia dan beberapa mitra pembangunan lain itu merupakan acara penting yang dapat mendukung upaya Supreme Audit Institution (SAI) dari seluruh dunia untuk mempererat kerja sama.

"Selamat kepada BPK atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan seminar internasional ini," ungkap Wanessa.

Dalam seminar tersebut, turut diikuti oleh 14 SAI dari berbagai belahan dunia. Wanessa menjelaskan, masing-masing SAI memiliki cara kerja yang berbeda. Sementara, isu terkait ekonomi hijau dan perubahan iklim merupakan isu besar yang perlu dihadapi secara bersama-sama.

"Seminar ini adalah acara yang tepat bagi kami para SAI untuk saling memperbaiki dan berkolaborasi dalam menciptakan sistem, mekanisme, dan audit kinerja yang lebih baik untuk dunia yang lebih baik," ujarnya.

Wanessa menekankan, SAI bisa bekerja sama utamanya dalam tiga hal yakni pelatihan, peningkatan kapasitas, dan komunikasi. Dengan saling bertukar keahlian dan memperbaiki komunikasi, dia meyakini, tujuan bersama dapat tercapai.



Ketika kita saling bertukar keahlian, bertukar pelatihan, dan berkolaborasi satu sama lain, saya yakin kita bisa mencapai tujuan apapun. Kita semua sudah memiliki metodologi yang baik.

"Ketika kita saling bertukar keahlian, bertukar pelatihan, dan berkolaborasi satu sama lain, saya yakin kita bisa mencapai tujuan apapun. Kita semua sudah memiliki metodologi yang baik. Saya pun belajar banyak dari SAI lain hari ini," ungkapnya.

Wanessa juga mengapresiasi hubungan baik yang terjalin antara BPK dan SAI Brasil selama ini. Pada 2022, kedua lembaga telah meneken *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerangka kerja sama dalam pemeriksaan di sektor publik.

Dia menilai, seminar yang digelar BPK menjadi awal yang baik dalam upaya memperkuat peran SAI dalam menangani isu ekonomi hijau. "Para SAI, juga sudah mulai bergerak dalam menindaklanjuti ekonomi hijau serta merumuskan kebijakan publik yang lebih baik untuk dunia. Jadi ini semua adalah awal yang sangat baik," ungkapnya. ~

Joshua Francis

Senior Director, Performance Audit Service Group ANAO

Ajang Berbagi Pengalaman Pemeriksaan Kinerja

Australian National Audit Office (ANAO) mengapresiasi peran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy". Senior Director, Performance Audit Service Group ANAO Joshua Francis menilai, seminar tersebut dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau.

"Kami bisa berbagi pengalaman mengenai topik terkait dengan ekonomi hijau serta kita bisa belajar mengenai apa yang sedang dilakukan SAI (Supreme Audit Institution) lainnya," ujar Francis di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Terdapat 14 SAI yang terlibat dalam acara tersebut. Dari pelaksanaan seminar, Francis mengatakan telah berhasil mendapatkan masukan dari diskusi yang menarik.



Saya mendapatkan banyak pemikiran yang bisa saya bawa pulang dan bagikan ke kolega di ANAO mengenai apa yang terjadi di Indonesia.

"Saya mendapatkan banyak pemikiran yang bisa saya bawa pulang dan bagikan ke kolega di ANAO mengenai apa yang terjadi di Indonesia," ujarnya.

Francis mengatakan, diskusi dalam rangkaian seminar juga akan membahas bagaimana cara SAI dapat meningkatkan pembangunan ekonomi hijau. Diharapkan, lewat pemeriksaan kinerja, SAI dapat memperbaiki peran pemerintah menjalankan aktivitas pembangunan.

ANAO memaparkan pengalaman pemeriksaan kinerja yang terkait ekonomi hijau. Francis mengatakan, ANAO telah melakukan sekitar 27 pemeriksaan kinerja terkait ekonomi hijau sejak 2015-2016.

"Kami juga membagikan bagaimana kami menyusun strategi audit jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya. ~

Dr Sutthi Suntharanurak

Director of International Cooperation State Audit Office of the Kingdom of Thailand

Mendukung Perumusan Kolaborasi Konkret



"Kami membagikan pengalaman pemeriksaan yang kami lakukan di Thailand berdasarkan analisis studi kasus dalam laporan pemeriksaan kinerja. Kami juga membagikan temuan mengenai cara-cara untuk bisa meningkatkan kualitas laporan pemeriksaan kinerja terkait ekonomi hijau," kata Suntharanurak.

Dia menilai, upaya membangun ekonomi hijau tak bisa dikerjakan sendiri. Para SAI di seluruh dunia perlu berjalan beriringan dalam menyikapi isu tersebut.

"Saya kira setelah pertemuan ini dan kita kembali ke rumah masing-masing, kita perlu terus berjalan bersama. Tak hanya di antara kita negara ASEAN, tapi juga seluruh dunia," ungkapnya. ~

Kolaborasi Supreme Audit Institution (SAI) di seluruh dunia diharapkan dapat menelurkan hasil konkret dalam pembangunan ekonomi hijau. Director of International Cooperation State Audit Office of the Kingdom of Thailand, Dr Sutthi Suntharanurak mengatakan, seminar internasional yang digelar oleh BPK dan Bank Dunia sangat menarik dan berbobot.

"Saya pikir kita ke depan bisa terus berkolaborasi secara erat dan mewujudkan aktivitas yang konkret," ungkap Suntharanurak.

Suntharanurak mengapresiasi BPK yang telah berhasil menggelar seminar internasional bertajuk "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy" di Jakarta pada 5-7 Juni 2023. Dia menilai, ajang tersebut dapat menjadi momen berbagi dan mempelajari banyak hal.

"Kami membagikan apa yang telah kami lakukan di SAI Thailand dan kami juga mendapatkan pengalaman dari pihak lainnya seperti dari Bank Dunia, Uni Eropa, dan institusi akademik. Kita bisa belajar dari mereka," ujarnya.

Dia menekankan, topik yang dipilih BPK juga sangat menarik sebagai upaya perbaikan terhadap pemeriksaan kinerja dalam mendukung ekonomi hijau. Menurutnya, topik ini perlu terus didukung.

— Kami membagikan apa yang telah kami lakukan di SAI Thailand dan kami juga mendapatkan pengalaman dari pihak lainnya seperti dari Bank Dunia, Uni Eropa, dan institusi akademik. Kita bisa belajar dari mereka.

Ismail Cengiz EREK

Turkish Court of Accounts

Bertukar Pengalaman untuk Perbaiki Kualitas Pemeriksaan

Kegiatan seminar internasional yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tema "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy" dinilai dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja bagi *supreme audit institution* (SAI) di berbagai belahan dunia. Perwakilan dari Turkish Court of Accounts, Ismail Cengiz telah mendapatkan banyak gagasan dan pemikiran dari acara tersebut. Di sisi lain, Cengiz juga berbagi pengalaman yang telah dikerjakan SAI Turki.

"Ketika kami kembali ke Turki, kami akan memeriksa kembali setiap detailnya dan kami akan mencoba bagaimana cara kami bisa memperbaiki pemeriksaan kami," ujar Cengiz kepada *Warta Pemeriksa*.

Cengiz menekankan, seminar internasional yang digelar BPK pada 5-7 Juni 2023 di Jakarta sangat bermanfaat karena membuka ruang kepada SAI untuk saling berinteraksi. Menurutnya, seminar itu telah membuka ruang diskusi dengan berbagai SAI termasuk juga dengan BPK.

Dia meyakini, ekonomi hijau dan SDGs adalah hal yang sangat penting dan menjadi perhatian masyarakat luas. Dengan demikian, SAI pun perlu melakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan kinerja.



Ketika kami kembali ke Turki, kami akan memeriksa kembali setiap detailnya dan kami akan mencoba bagaimana cara kami bisa memperbaiki pemeriksaan kami.

Menurutnya, pemeriksaan kinerja dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Akan tetapi, seluruh SAI perlu meningkatkan jumlah pemeriksaan ini dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan efektifitasnya.

"Mudah-mudahan dunia ini akan menjadi lebih baik dari saat ini," ujarnya.

SAI Turki dan BPK juga berkomitmen untuk terus bekerja sama. Terdapat sejumlah rencana ke depan untuk melaksanakan pemeriksaan bersama.

"BPK bisa berbagi pengalaman kepada kami dan kami juga memberikan pengalaman kami untuk BPK," ungkapnya. ~

Isnaeni Achdiat

Managing Director Government and Public Sector EY Indonesia Consulting

Hasil Pemeriksaan Ekonomi Hijau Sangat Ditunggu Masyarakat

Pemeriksaan kinerja dapat menjadi jawaban atas pernyataan masyarakat yang kerap menantikan hasil dari sebuah pemeriksaan. Managing Director Government and Public Sector EY Indonesia Consulting Isnaeni Achdiat menyampaikan, pemeriksaan kinerja akan memberikan jawaban terhadap progres pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, menurut Isnaeni, kegiatan seminar internasional yang digelar BPK sangat relevan untuk mendukung pemeriksaan kinerja yang lebih berdampak pada masyarakat.

"Saya saat ini menjadi lebih optimistis setelah melihat berbagai pihak berbicara dan berbagi pengalaman," ujar Isnaeni kepada *Warta Pemeriksa*.

Isnaeni juga mengapresiasi inisiatif BPK dalam menangkap partisipasi internasional untuk membahas topik tersebut. Menurutnya, tema ekonomi hijau adalah relatif baru.

Dia meyakini, seminar tersebut menjadi tempat yang baik untuk bertukar gagasan di antara peserta yang datang dari berbagai negara. Ini karena negara yang hadir tidak hanya dari Asia, tapi bahkan dari Brasil, Turki, dan Australia.



Saya kira bertukar ide adalah hal yang baik dalam membuat inovasi bagi seluruh peserta. Ketika mereka kembali ke negara masing-masing, mereka akan melaporkan gagasan yang dibahas dan bagaimana mereplikasi kesuksesan dari negara lain.

"Saya kira bertukar ide adalah hal yang baik dalam membuat inovasi bagi seluruh peserta. Ketika mereka kembali ke negara masing-masing, mereka akan melaporkan gagasan yang dibahas dan bagaimana mereplikasi kesuksesan dari negara lain," ujarnya.

Isnaeni menekankan, pembangunan ekonomi hijau bukan hanya penting untuk pemerintah tapi justru untuk masyarakat. Dia menyampaikan, masyarakat terutama generasi muda sangat memberikan perhatian terhadap topik ini.

"Sehingga, masyarakat memiliki ekspektasi kepada pemerintah untuk menjalankan program yang ada," ujarnya.

Isnaeni mengakui, sejumlah SAI masih menghadapi permasalahan dalam mendorong dampak pemeriksaan kinerja untuk ekonomi hijau. Akan tetapi, dia menilai, hal itu juga terjadi karena isu ekonomi hijau relatif masih baru.

Justru, menurutnya, dengan dialog seperti yang digelar BPK, ke depannya akan ada rencana aksi yang konkret. "Pertemuan ini juga membuka kesempatan kolaborasi antar-SAI atau juga dengan mitra pembangunan lainnya. Saya kira saya harus optimistis," ujarnya. ~

Meraih Sukses Lewat Kontrol Diri



KEMAMPUAN DALAM MENGONTROL DIRI MERUPAKAN SUMBER YANG BERTARUHAN UNTUK MENCAPAI KEBERHASILAN HIDUP.

Dalam menjalani aktivitas pekerjaan, kita seringkali menghadapi situasi yang mengecewakan, bahkan mungkin membuat frustrasi. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol diri.

Employee Care Center (ECC) BPK mencoba mengulas makna kontrol diri dan seberapa penting hal tersebut bagi kesuksesan seseorang. ECC menjelaskan, kontrol diri merupakan sumber yang berharga untuk mencapai keberhasilan hidup. "Perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan dan hidup sehat memerlukan adanya keterlibatan dari kontrol diri," demikian disampaikan dalam Bincang ECC edisi Mei 2023.

Selain itu, kontrol diri adalah kapasitas seseorang untuk mengubah respons dalam menyesuaikan diri dengan standar seperti cita-cita, nilai, moral, dan harapan sosial, dan untuk mendukung pencapaian

tujuan jangka panjang. Singkatnya, kontrol diri sebagai kapasitas untuk mengendalikan respons agar bertindak sesuai standar demi tercapainya tujuan jangka panjang.

Menurut penjelasan ECC, terdapat beberapa model kontrol diri. Model pertama adalah model Ferrari yang menyatakan bahwa ada dua dimensi kontrol diri, yaitu impuls kontrol yang merupakan resistensi individu untuk menahan *short-term reward* atau menahan godaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dimensi kedua adalah *self-discipline* yang didefinisikan sebagai pola perilaku umum individu untuk menjadi disiplin.

Adapun model kedua dari kontrol diri adalah model De Ridder. Model ini menjelaskan bahwa kontrol diri terdiri atas dua dimensi. Pertama adalah *inhibition* yaitu kemampuan diri untuk menahan godaan *impuls*. Kedua adalah inisiasi, yaitu kemampuan untuk memulai perilaku berorientasi tujuan.

MENGUATKAN KONTROL DIRI

Kontrol diri akan sangat diperlukan apabila Anda menghadapi situasi yang mengecewakan. Agar Anda siap menghadapi beragam situasi yang memicu reaksi cepat dan intens Anda atau situasi "tombol panas", ECC menyarankan berlatih menerapkan Siklus Kontrol Diri. Tujuannya, apabila Anda menilai sendiri atas respon anda dengan nilai 1-10, setidaknya

anda dapat memberikan nilai 8 untuk aksi yang Anda lakukan.

Dengan nilai yang tinggi menunjukkan Anda konsisten dapat mengontrol diri dengan baik dan efektif menghadapi situasi yang menantang dalam level pribadi. Berikut kiat latihan yang bisa dilakukan untuk memperkuat kontrol diri.

1 Membaca situasi

Dalam tahapan ini, anda perlu mengidentifikasi situasi "tombol panas" yang memicu reaksi cepat dan intens. Situasi tombol panas memiliki potensi membuat Anda kesal, misalnya di tempat kerja dan memunculkan reaksi yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif untuk Anda dan orang di sekitar Anda.

2 Melacak reaksi Anda

Setelah Anda mengenali situasi apa yang menimbulkan tombol panas, langkah berikutnya adalah lacak reaksi BASIC (Behavior-Affect-Sensation-Image-Cognition) Anda. Behavior (B) adalah perilaku yang berhubungan dengan tindakan yang diamati. Affect (A) adalah hal-hal yang memengaruhi emosi atau kondisi psikologis. Sensation (S) adalah respon fisik dalam tubuh Anda. Image (I) atau gambaran mental dalam pikiran. Sedangkan Cognition (C) adalah pikiran/pembicaraan internal diri.

3 Tentukan apa yang dibutuhkan

Setelah melacak BASIC reaksi Anda, buat profil tentang diri bagaimana merespons situasi, lalu putuskan aksi apa yang diperlukan agar situasi "tombol panas" dapat terkendali. Misalnya Anda tidak suka diberi penugasan menghadiri suatu rapat, anda merasa kesal (A), anda mencari alasan untuk tidak hadir (B), anda membayangkan rapatnya akan memakan waktu lama (I).

Anda bisa melatih dengan memikirkan reaksi positif BASIC, misalnya, menanyakan dulu pada atasan yang memberi tugas mengenai agenda rapat dan berdiskusi mengenai apa yang bisa Anda sumbangkan (B), kemudian selama rapat Anda mengukur tingkat ketegangan dan ketenangan Anda terkait topik yang sedang dibahas (A), Anda lacak setiap perasaan positif yang hadir (S).

Anda juga dapat berbicara dengan diri anda sendiri bahwa rapat ini dapat berpengaruh pada kesuksesan karir Anda, sehingga menghadiri rapat menguntungkan Anda (C).

4 Lakukan aksi dengan dampak besar

Lakukan aksi atau tindakan yang membawa pengaruh atau perubahan besar sehingga mendekati standar yang dituju atau harapan dari lingkungan Anda. Ukur dampak nilai seberapa besar aksi Anda mendatangkan pengaruh pada situasi Anda. Apakah tindakan yang Anda lakukan membawa pengaruh positif? Misalnya apakah atasan puas dengan pilihan Anda menghadiri rapat?

5 Lakukan adaptasi

Saat aksi yang Anda lakukan efektif, adaptasi tidak diperlukan. Adaptasi diperlukan bila dampak yang ingin dicapai tidak hadir.



BPK Selesaikan Seluruh Tahapan Pemeriksaan LKPP Tahun 2022

PEMERIKSAAN INI DIDUKUNG DENGAN PEMERIKSAAN ATAS 82 LKKL DAN LKBUN TAHUN 2022. TERMASUK PEMERIKSAAN DI TINGKAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) DAN BADAN USAHA OPERATOR.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyampaikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Hal ini dilakukan setelah BPK menyelesaikan seluruh tahapan pelaksanaan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022.

Ketua BPK, Isma Yaton, mengatakan untuk tahapan selanjutnya, BPK akan segera menyelesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang akan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. "LHP tersebut akan memuat opini BPK atas LKPP tahun 2022," ujar Ketua BPK dalam sambutannya pada pertemuan akhir atau *exit meeting* pemeriksaan atas LKPP di auditorium kantor pusat BPK, di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Opini tersebut, kata Ketua BPK, diberikan setelah mempertimbangkan empat hal. Mulai dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan *exit meeting* pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dihadiri oleh para Pimpinan BPK, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah Sri Mulyani, serta menteri dan pimpinan lembaga yang hadir baik secara fisik maupun daring.

Sementara itu, pimpinan BPK yang hadir adalah Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK mengatakan, *exit meeting* pemeriksaan atas LKPP merupakan bagian akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan LKPP. Pemeriksaan ini didukung dengan pemeriksaan atas 82 LKKL dan LKBUN tahun 2022. Termasuk pemeriksaan di tingkat kuasa pengguna anggaran (KPA) bendahara umum negara (BUN) dan badan usaha operator.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota II BPK mengapresiasi seluruh tim pemeriksa LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2022. Karena telah menyelesaikan pemeriksaan yang sangat kompleks sesuai jadwal yang telah disepakati bersama oleh BPK dan pemerintah.

"Penyelesaian pemeriksaan tersebut tentunya dengan tetap menjaga kualitas proses dan hasil pemeriksaan serta nilai-nilai dasar BPK, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme," ujar Anggota II BPK.

"Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah, para menteri/pimpinan lembaga beserta seluruh jajarannya yang telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK, baik di tingkat LKKL dan LKBUN maupun LKPP," kata dia. ~



Penyelesaian pemeriksaan tersebut tentunya dengan tetap menjaga kualitas proses dan hasil pemeriksaan serta nilai-nilai dasar BPK, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme.



Anggota V BPK Tegaskan Bahwa LKPD Berpedoman kepada SPKN

**CAPAIAN INI HENDAKNYA MENJADI DORONGAN
UNTUK SELALU MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berpedoman kepada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Hal ini disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2022 kepada DPRD Provinsi Jabar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di Bandung, Senin (15/5/2023).

Penyerahan tersebut dilakukan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ahcmad Ru'yat dan Gubernur Jabar, Mochamad Ridwan Kamil dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Jabar.

"Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman kepada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai sehingga bebas dari kesalahan penyajian yang material," ujar dia.

Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, tambah Supit, BPK memberikan opini atas laporan keuangan. Tak hanya itu, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan dari Pemprov Jabar atas konsep rekomendasi BPK. Termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Jabar tahun anggaran 2022.

"Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP yang kedua belas kalinya," ungkap Anggota V.

Anggota V menegaskan bahwa capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Termasuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti. Dia pun mengingatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. ~

BPK Dorong Penyelesaian Tindak Lanjut oleh Pemprov Kalimantan Selatan

BPK PUN BERHARAP LHP ATAS LKPD DAPAT DIMANFAATKAN OLEH PARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI NYA.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tahun anggaran 2022. BPK pun berharap LHP atas LKPD dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka melaksanakan fungsinya.

Meskipun begitu, BPK tetap mengungkap permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Pemprov Kalsel. Meskipun dampaknya tidak material dalam memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan, permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel.

Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK, Pius Lustrilantang. Menurutnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel tahun anggaran 2022, terdapat permasalahan kekurangan penerimaan serta kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah.

"Seluruh temuan telah kami muat dalam buku II, yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," ujar Anggota VI BPK pada penyerahan LHP atas LKPD dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (16/5/2023).

Permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain, retribusi sewa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang terlambat disetor dan kurang diterima. Kemudian lemahnya pengendalian intern atas pengelolaan dan pemungutan retribusi sewa alsintan.



Selanjutnya, terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal dan belanja pemeliharaan. Lalu kelebihan biaya mobilisasi dan penggunaan *excavator* milik Pemprov Kalsel atas realisasi belanja sewa *excavator*.

Permasalahan tersebut, kata Anggota VI BPK, harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan.

"Saya berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya," ungkapnya.

LHP atas LKPD Provinsi Kalsel tahun 2022 diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang disaksikan para anggota DPRD Provinsi Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2022. IHPD ini memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. ~

BPK Apresiasi Capaian Positif PLN

DI SAMPING CAPAIAN POSITIF TERSEBUT, HASIL PEMERIKSAAN MENEMUKAN KELEMAHAN DALAM PERHITUNGAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK DAN DANA KOMPENSASI LISTRIK.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi capaian positif yang sudah dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK, Hendra Susanto saat menyerahkan 2 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan PLN.

LHP tersebut adalah LHP kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2020 s/d semester I tahun 2022. Kemudian LHP kepatuhan atas perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik dan dana kompensasi tarif tenaga listrik tahun 2021.

LHP diterima langsung oleh Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo dan Komisaris Utama PT PLN, Amien Sunaryadi di Jakarta, Jumat (19/5/2023). "BPK mengapresiasi capaian positif yang sudah dilakukan oleh PLN. Di antaranya adalah PLN mendukung program listrik desa (PLD). Sampai dengan September 2021, sebanyak 83.125 desa telah mencapai rasio desa berlistrik (RDB) sebesar 99,62%. Sedangkan pada Desember 2022, rasio elektrifikasi (RE) nasional tercapai sebesar 99,63%," ujar Anggota VII BPK.

Meskipun begitu, Anggota VII BPK mengungkapkan, di samping capaian positif tersebut, hasil pemeriksaan menemukan kelemahan dalam perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik dan dana

kompensasi listrik. Salah satunya adalah dalam perhitungan tarif tenaga listrik. Perhitungan harga patokan batubara (HPB) dalam penyesuaian tarif belum selaras dengan perhitungan harga jual batubara transaksi berjangka yang telah berlangsung di PLN.

"Untuk itu, BPK merekomendasikan jajaran di PLN agar mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mempertegas ketentuan perhitungan HPB dalam perhitungan penyesuaian tarif sebagai pedoman bagi PLN dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik," ungkap Anggota VII BPK.

Selain menyerahkan LHP, Anggota VII juga memimpin pelaksanaan *entry meeting* atas pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan listrik tahun 2022.

"Saya selalu menekankan kepada setiap pemeriksa agar melakukan pemeriksaan secara berkualitas dan bermanfaat," kata dia.

Secara berkualitas, ungkap dia, memiliki arti bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan. Sementara bermanfaat artinya pemeriksaan BPK memberikan nilai tambah bagi yang diperiksa. Baik selama proses pemeriksaan berlangsung maupun melalui rekomendasi pemeriksaan yang diberikan. ~



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Penyusunan Temuan Pemeriksaan BPK



IR. CATUR SETIAWAN

PEMERIKSA MUDA
BPK PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

DISRUPSI TEKNOLOGI DIKETAHUI MEMBERIKAN PERUBAHAN PADA TEKNOLOGI LAMA YANG SEBELUMNYA LEBIH BANYAK MENGGUNAKAN FISIK MENJADI LEBIH SERING MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL, DAN MENGHASILKAN SEJUMLAH HAL YANG BENAR-BENAR BARU, YANG LEBIH BERMANFAAT DAN LEBIH EFISIEN, DALAM JANGKA WAKTU YANG CEPAT.

Era disrupsi teknologi adalah periode dimana teknologi baru atau inovasi muncul dan mengubah cara orang melakukan sesuatu, biasanya dengan menggantikan cara lama menjadi lebih baru. Disrupsi teknologi dapat mengubah sistem teknologi digital secara fundamental sehingga dapat mengubah perilaku dengan memberikan cara baru yang lebih mudah atau efisien untuk melakukan sesuatu. Hal ini selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu memudahkan manusia dalam beraktivitas, seperti bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebutuhan lain terkait organisasi.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) ternyata telah banyak diimplementasikan oleh instansi pemerintah dalam berbagai inovasi untuk mempercepat pelayanan di berbagai bidang (Kemenpan RB, 2022).

Perkembangan teknologi digital ini kemudian disebut juga sebagai revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan semakin banyak hadirnya *Internet of Things* (IoT), yang telah mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti yang diungkapkan Hootsuite: We Are Social, pada bulan Januari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang, yang mencakup 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia (Gamedia, 2022).

Kemunculan revolusi industri 4.0 ini juga ditandai dengan tingginya penggunaan teknologi berbagai pakai, konektivitas sistem informasi, dan utilisasi teknologi cerdas atau robot AI dan teknik otomasi, yaitu penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi. Menurut penelitian Schwab (2016), salah satu jembatan utama antara aplikasi fisik dan digital yang dimungkinkan oleh revolusi industri 4.0 adalah internet of things (IoT), terkadang disebut juga "internet of all things". Dalam bentuknya yang paling sederhana, ini dapat digambarkan

sebagai hubungan antara hal-hal (produk, layanan, tempat, dll.) dan orang-orang yang dimungkinkan oleh teknologi yang terhubung dan berbagai *platform*. Dengan memanfaatkan IoT dan memadukannya dengan teknologi, yang mengakibatkan dimensi biologis, fisik, dan digital menjadi sulit untuk dibedakan. Hal tersebut ditandai dengan peralihan menjadi serba digital dan pemanfaatan AI secara masif di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi.

MANFAAT DISRUPSI TEKNOLOGI

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa disrupsi teknologi membawa perubahan yang besar yang dapat memberikan tantangan besar dalam berbagai bidang. Salah satu tantangan disrupsi teknologi bagi BPK saat ini adalah menghasilkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkualitas yaitu hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti dan mempengaruhi sistem entitas yang diperiksa. Dalam hal ini, maka BPK perlu meningkatkan suatu kinerja pemeriksaan dengan alat bantu teknologi berupa AI untuk mendukung proses penyusunan suatu temuan pemeriksaan dengan efisien dan efektif.

Meskipun memberikan berbagai tantangan dalam organisasi disrupsi teknologi juga dapat memberikan sejumlah manfaat. Disrupsi teknologi diketahui memberikan perubahan pada teknologi lama yang sebelumnya lebih banyak menggunakan fisik menjadi lebih sering memanfaatkan teknologi digital, dan menghasilkan sejumlah hal yang benar-benar baru, yang lebih bermanfaat dan lebih efisien, dalam jangka waktu yang cepat. Hal penting yang harus diperhatikan dan tidak bisa dipisahkan jika ingin mendapatkan manfaat dari disrupsi teknologi adalah etika dalam pemanfaatan teknologi, yang mempertimbangkan waktu dan kebutuhan tertentu.

LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI

1. Peningkatan Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu modal utama dalam organisasi. SDM yang berkualitas dan memiliki integritas baik akan membawa perubahan-perubahan positif pada organisasi.

2. Transformasi Digital

Suatu korporasi yang telah mengoptimalkan teknologi digital akan mampu bertahan di era disrupsi saat ini. Mereka menggunakan berbagai teknologi untuk mendukung strategi bisnis agar tetap relevan terhadap perubahan zaman serta mempermudah pekerjaan dan menghemat biaya pengeluaran lainnya.

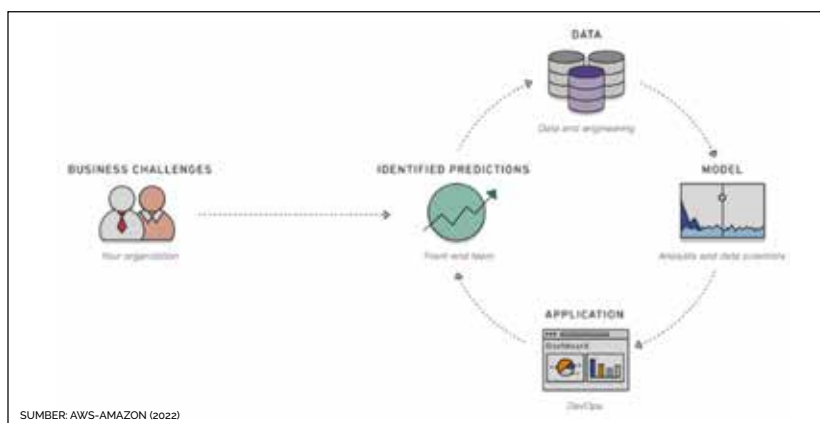
3. Inovasi Berkelanjutan

Inovasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu tujuan yang berkelanjutan maka suatu organisasi perlu terus menerus melakukan inovasi. Namun, inovasi juga harus disertai dengan riset agar dapat membantu memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan memiliki potensi sukses dalam implementasinya. Riset juga dapat membantu mengidentifikasi peluang inovasi dan mengevaluasi dampaknya pada bisnis atau industri tertentu.

Untuk memahami disrupsi teknologi lebih lanjut, berikut ini uraian pemanfaatan dan contoh disrupsi teknologi dalam kaitan otomatisasi penyusunan tulisan (*content writing*) melalui teknologi-teknologi pendukung yang sangat membantu manusia, antara lain:

1. Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan

AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat memperlakukan data seperti manusia. Tujuan dari AI adalah untuk membuat mesin yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, pemecahan masalah, dan pengenalan pola dan bekerja secara mandiri. Profesor Pedro Domingos, seorang peneliti Ilmu Komputer dari University of Washington, menggambarkan "lima suku" *machine learning*, yang terdiri dari simbolis, yang berasal dari logika dan filsafat; koneksionis, yang berasal dari ilmu saraf; evolusioner, berkaitan dengan biologi evolusioner; Bayesian, berhubungan dengan ilmu statistik dan probabilitas; dan analogis yang berasal dari ilmu psikologi.



Gambar 1. Penerapan AI (Machine Learning)

Sesuai gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa AI mampu menelusuri, mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, memprediksi, hingga menampilkan data secara cermat. Berdasarkan pengolahan dan analisis, AI juga mampu membantu proses pengambilan keputusan dalam masalah, perumusan serta menjawab masalah.

2. Internet of Things (IoT)

Internet telah menjadi media utama bagi banyak kalangan di seluruh dunia. Internet memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, mencari informasi, dan melakukan banyak hal lain secara *online*. Dengan internet, kita dapat terhubung dengan orang di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja. Hal ini kemudian menjadikan internet menjadi teknologi digital yang telah menjadi bagian kebutuhan manusia dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

3. Big Data and Quantum Computing

Big data dapat membantu dalam mencari data dengan menggunakan teknik-teknik yang dapat memproses data secara cepat dan efisien. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan algoritma pencarian yang dapat mengekstrak informasi dari data yang sangat besar. Kemampuan untuk mengakses dan menganalisis data secara cepat dan efisien sangat penting dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan menemukan solusi untuk masalah yang rumit. Teknologi digital komputasi kuantum menggunakan prinsip-prinsip kuantum mekanik untuk memproses informasi. Teknologi ini merupakan teknologi yang masih dalam tahap perkembangan, tetapi diyakini bahwa komputasi kuantum dapat menyelesaikan beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer konvensional.

4. Cloud Access Computing

Cloud Access Computing adalah model komputasi dimana data dan aplikasi di-*hosting* di server internet yang diakses melalui jaringan internet. Teknologi ini merupakan penggambaran dari internet yang akan terus mengalami peningkatan akses. Sejauh ini telah tercatat bahwa kurang lebih 80% dari 100% kebutuhan inovasi pada penggunaan big data akan dipengaruhi oleh sistem *cloud access*.

5. Application Programming Interface (API)

API adalah seperangkat kode yang mengizinkan aplikasi atau sistem lain untuk terhubung dan berinteraksi dengan aplikasi atau sistem lain. API memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara aplikasi atau sistem yang terhubung, sehingga mereka dapat bekerja secara terintegrasi. API dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.



SUMBER: AJWAD INFOTECH (2021)

Gambar 2. Alur proses kerja API

PEMANFAATAN AI UNTUK PENYUSUNAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

Machine Learning (ML) dan Deep Learning (DL) adalah bagian dari AI. Semua ML dan DL merupakan AI, tetapi tidak semua AI dianggap sebagai ML dan DL. Sebagai contoh, penerapan algoritma, logika simbolik, mesin aturan, sistem pakar dan grafik pengetahuan semua bisa digambarkan sebagai AI, namun tidak dapat dikategorikan sebagai ML maupun DL.

Salah satu aspek yang membedakan ML dengan sistem pakar dan grafik pengetahuan adalah kemampuannya untuk memodifikasi sendiri ketika melibatkan lebih banyak data; sehingga ML bersifat dinamis dan tidak memerlukan campur tangan manusia untuk membuat perubahan tertentu. Hal tersebut membuatnya kurang rapuh, dan kurang bergantung pada ahli manusia.

Penerapan Machine Learning (ML)

ML adalah kumpulan algoritma yang dapat mempelajari dan membuat prediksi berdasarkan data yang telah direkam, sehingga sistem yang dibangun dapat bekerja tanpa bantuan program manusia. Dalam sebuah pengembangan ML terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui sebelum model tersebut bisa diimplementasi di tahap produksi. Tahapan-tahapan yang dimaksud menurut buku *Hands on Machine Learning* karya Geron (2018) dapat dirangkum dalam diagram berikut.



Gambar 3. Tahap-tahap Pengembangan ML

Tahapan dalam diagram yang bersifat iteratif artinya bahwa proses tersebut harus diulang secara terus-menerus sampai tujuan yang ditentukan tercapai. Sehingga, mungkin perlu dilakukan evaluasi ulang proses yang telah dijalankan dan kembali ke langkah sebelumnya, kapan saja dibutuhkan selama prosesnya.

ML lebih banyak digunakan untuk memprediksi hasil dimasa depan berdasarkan data historis. Namun, ML tidak selalu memberikan hasil yang tepat, terutama jika data yang tersedia tidak representatif atau tidak cukup untuk memahami pola yang mungkin terjadi di masa depan. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ML dalam operasionalnya. Pertama, mengidentifikasi masalah yang tepat, yaitu mengidentifikasi prediksi yang akan menjadi tujuan. Selanjutnya, pengumpulan data berdasarkan metrik data historis (transaksi, permohonan layanan, keluhan, dll.). Setelah data digabungkan, model ML dapat dibuat berdasarkan data tersebut. Model ML dijalankan dan keluaran prediksi dari model tersebut diterapkan kembali ke sistem untuk membuat keputusan yang lebih tepat.

Penerapan Deep Learning (DL)

DL adalah bagian dari pembelajaran mesin. Pada umumnya, DL didefinisikan sebagai sistem yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan.

DL merupakan bagian dari ML yang memiliki jaringan tersendiri. DL mampu mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel.

Salah satu contoh penerapan DL yang paling terkenal adalah pada Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming tersebut, DL digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video kepada pengguna, sesuai dengan preferensi, kebutuhan dan kebiasaan pengguna.

Selanjutnya menurut Grover, R (2019) ada beberapa contoh berbagai penerapan DL dalam dunia bisnis yang mampu mengantarkan perusahaan tersebut sukses dibidangnya, antara lain:

1. Virtual assistant: Cortana, Alexa, dan Siri.
2. Visi untuk mobil tanpa pengemudi: Tesla.
3. Chatbots dan layanan pelanggan otomatis: Sephora, Fandango, dan AccuWeather.
4. Sistem penerjemah: Google Translate dan SayHi.
5. Facial recognition: Facebook dan iOS.
6. Marketplace dan e-commerce: Amazon dan Myntra.

Sebuah riset terbaru yang dilaksanakan oleh OpenAI pada November 2022 merilis suatu teknologi dengan nama ChatGPT (OpenAI, 2022), dalam rilis tersebut menyatakan bahwa pihak pengembang mengembangkan model yang disebut ChatGPT yang berinteraksi dengan cara percakapan. Format dialog memungkinkan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan tindak lanjut, mengakui kesalahannya, menantang premis yang salah, dan menolak permintaan yang tidak pantas. ChatGPT adalah model yang serupa dari InstructGPT, yang dilatih untuk mengikuti instruksi secara cepat dan memberikan respons mendetail.

Dalam riset sebelumnya, juga terdapat model GPT-3 yang dirilis oleh Brown T, dkk (2020) yang kemudian dikembangkan melalui model berbasis web dengan nama WebGPT oleh Nakano, dkk (2022) yang menyatakan bahwa pengembang telah menyempurnakan GPT-3 untuk menjawab pertanyaan panjang menggunakan format web berbasis teks, yang memungkinkan model untuk mencari dan menavigasi web. Selanjutnya dari riset tersebut menunjukkan bahwa Jawaban model ini lebih disukai oleh manusia 56% daripada jawaban para demonstiran versi manusia, dan 69% dari sisi waktu menjawab dengan pilihan tertinggi dari Reddit.

AI mengubah cara kita melakukan sesuatu, baik itu untuk pribadi atau untuk keperluan organisasi. Salah satu cara paling menarik AI telah diterapkan pada pemasaran konten adalah alat bantu penulisan konten berbasis AI yang dapat menghasilkan salinan asli secara otomatis. Riset yang dilakukan Seidler T (2022) juga telah mengulas keuntungan penggunaan alat bantu penulisan berbasis AI. Seluruh paragraf dihasilkan dalam sekejap mata hanya dengan memberikan beberapa kata kunci dan mengklik kirim. Tidak hanya itu, *copywriting* yang dihasilkan menyaingi keluaran manusia profesional mana pun tergantung pada materi pelajaran.

Lebih lanjut dalam penelitian Liaquat A (2022) menjelaskan beberapa parameter penilaian kualitas fitur-fitur yang ditawarkan dalam alat bantu penulisan berbasis AI juga telah diuji pada 10 brand alat bantu penulisan berbasis AI, antara lain:

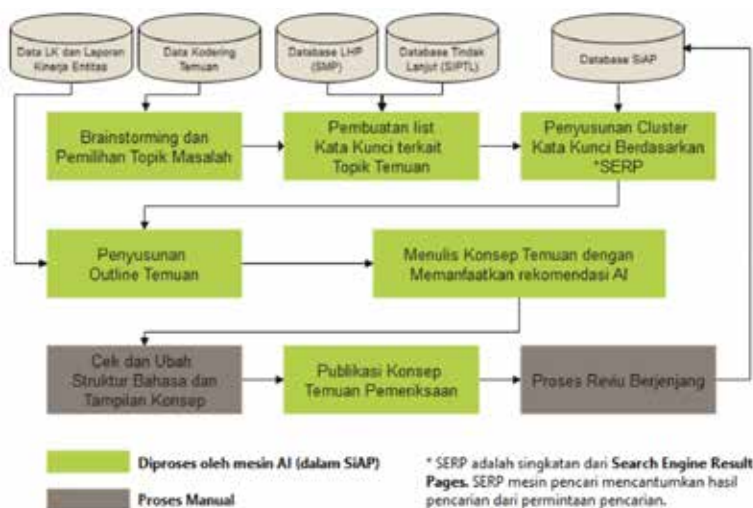
Tabel 1. Aspek yang diuji dalam menilai kualitas alat bantu penulisan berbasis AI

No.	Aspek Yang Diuji	Item-item Yang Dinilai
1.	Penggunaan dan fungsi produk secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Functionality • Ease of Use • Overall use experience • Support • Deal Structure
2.	Fitur-fitur yang ditawarkan oleh produk alat bantu penulisan berbasis AI	<ul style="list-style-type: none"> • User experiences • Number of Modules • Long Form • Content Editor • Chrome Extention • Saves History

SUMBER: LIAQUAT A (2022) DIOLAH

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sejumlah aspek dalam menentukan kriteria alat bantu penulisan berbasis AI yang baik juga dipertimbangkan dalam proses pengembangan sistem. Hal tersebut dapat menjadi referensi bagi BPK agar dalam mengembangkan suatu otomasi untuk proses penyusunan temuan BPK dapat menggunakan teknologi AI, khususnya pada tahap penyusunan temuan pemeriksaan menggunakan aplikasi SiAP dengan mempertimbangkan data historis LHP dalam Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) serta data lain berupa Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Kinerja Entitas sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pemeriksa, sehingga penyusunan temuan pemeriksaan lebih efektif dan efisien.

Uraian pemanfaatan alat bantu penulisan temuan pemeriksaan berbasis AI dalam SiAP dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Gambaran Alur Proses Otomasi Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat proses manual dan proses otomasi yang dilakukan oleh mesin AI dalam penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Proses manual tetap dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam konsep telah sesuai dengan parameter dan kriteria awal yang ditentukan. Sedangkan proses otomasi dilakukan untuk membantu pemeriksa dalam meminimalisir adanya inkonsistensi dalam proses penyusunan redaksional kondisi, kriteria pemeriksaan, sebab dan akibat serta rekomendasi terkait permasalahan sejenis.

PENUTUP

Disrupsi Teknologi merupakan tantangan yang cukup berat dimana BPK harus melakukan inovasi secara terus menerus agar dapat tetap relevan dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, BPK perlu mempersiapkan suatu inovasi yang mengadopsi teknologi terkini agar mampu memberikan kualitas hasil pemeriksaan yang baik serta dapat meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka untuk mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara dengan berbagai inovasi yang memudahkan pemeriksa BPK dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan secara efisien dan efektif. ~

Referensi

- Kementerian PANRB; Pemanfaatan 'Artificial Intelligence' Ditengah Gempuran Disrupsi; diakses pada URL <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pemanfaatan-artificial-intelligence-ditengah-gempuran-disrupsi>; tanggal akses 22 Desember 2022
- Gabriel; Disrupsi Teknologi; Pengertian, Penyebab, Contoh, Manfaat; diakses pada URL <https://www.gramedia.com/best-seller/disrupsi-teknologi/>; tanggal akses 22 Desember 2022
- Schwab K; The Fourth Industrial Revolution; 2016; World Economic Forum-Switzerland; www.weforum.org; ISBN-13: 978-1-944835-01-9; ISBN-10: 1944835016; REF: 231215
- Mauri, Jacopo; 4 Benefits Of AI In Personalized Learning - eLearning Industry; diakses pada URL <https://elearningindustry.com/benefits-of-artificial-intelligence-in-personalized-learning>; tanggal akses Desember 2022
- Kemp Simon; Digital 2022: Indonesia — DataReportal – Global Digital Insights; 2022; diakses pada URL <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>; tanggal akses 22 Desember 2022
- Amazon Web Services (AWS); Apa itu Kecerdasan Buatan? Machine Learning dan Deep Learning; diakses pada URL <https://aws.amazon.com/id/machine-learning/what-is-ai/>; tanggal akses 24 Desember 2022
- Reshma V M; Application Programming Interface (API); 2021; diakses pada URL <https://ajwadinfotech.com/application-programming-interface-api/>; tanggal akses 22 Desember 2022
- Seidler Tim; Best AI Content Writer - 2023 AI Writing Tool Reviews | WebMonkey; 2022; diakses pada URL <https://www.webmonkey.com/best-ai-content-writer> tanggal akses 22 Desember 2022
- Brown Tom B, dkk; Language Models are Few-Shot Learner; 2020; OpenAI
- Nakano Reiichiro; WebGPT: Browser-assisted question-answering with human feedback; 2022; OpenAI
- Liaquat Ali; Top 7 AI-based Content Writing Tools; 2022; diakses pada URL <https://aliliaquat.com/ai-content-writing-copywriting-tools>; tanggal akses 22 Desember 2022
- Open AI; ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue; 2022; diakses pada URL <https://openai.com/blog/chatgpt/> tanggal akses 2 Januari 2023
- Arxiv.org; WebGPT: Browser-assisted question-answering with human feedback;2022; diakses pada URL <https://arxiv.org/abs/2112.09332>; tanggal akses 2 Januari 2023
- Grover Richa; Deep Learning - Overview, Practical Examples, Popular Algorithms | Analytics Steps; 2019; diakses pada URL <https://www.analyticssteps.com/blogs/deep-learning-overview-practical-examples-popular-algorithms>; tanggal akses 2 Januari 2023
- Mathew, Vivek; Artificial Intelligence Blog Writing: A Blog Post In 30 Minutes Or Less (Tips And Tools); 2022; diakses pada URL <https://imeanmarketing.com/blog/artificial-intelligence-blog-writing/>; tanggal akses 2 Januari 2023



Pengamanan **Password**



- **Gunakan *password* yang kuat**

Panjang *password* minimal 8 karakter.

- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.

- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

- **Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri**
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan **Password**

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



1-10

Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444 H, BPK RI menggelar Halal Bihalal di lingkungan BPK RI yang dihadiri Pimpinan BPK RI pada 2 Mei 2023. Di awal sambutannya Ketua BPK RI menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1444 H kepada keluarga besar BPK RI dan menyampaikan agar pegawai BPK menjaga integritas yang merupakan poin krusial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK terutama untuk menjaga kepercayaan publik. Acara Halal Bihalal ini turut dihadiri oleh para pejabat tinggi madya di lingkungan BPK RI, serta BPK Perwakilan di seluruh Indonesia secara virtual.





11



12

11-14
Penyerahan Laporan LHP atas LK OJK dan LK LPS Tahun 2022, di kantor pusat BPK, Jakarta, 23 Mei 2023. LHP diserahkan oleh Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa.



13



14



15



16

15-16
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jawa Tengah oleh Anggota V/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit kepada kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sukirman dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Jawa Tengah, 22 Mei 2023.

17
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kalimantan Barat dihadiri oleh Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang, 9 Mei 2023.



17



18

18
Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang menyerahkan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Utara, 15 Mei 2023.

19
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kalimantan Utara oleh Anggota VI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang, 25 Mei 2023.

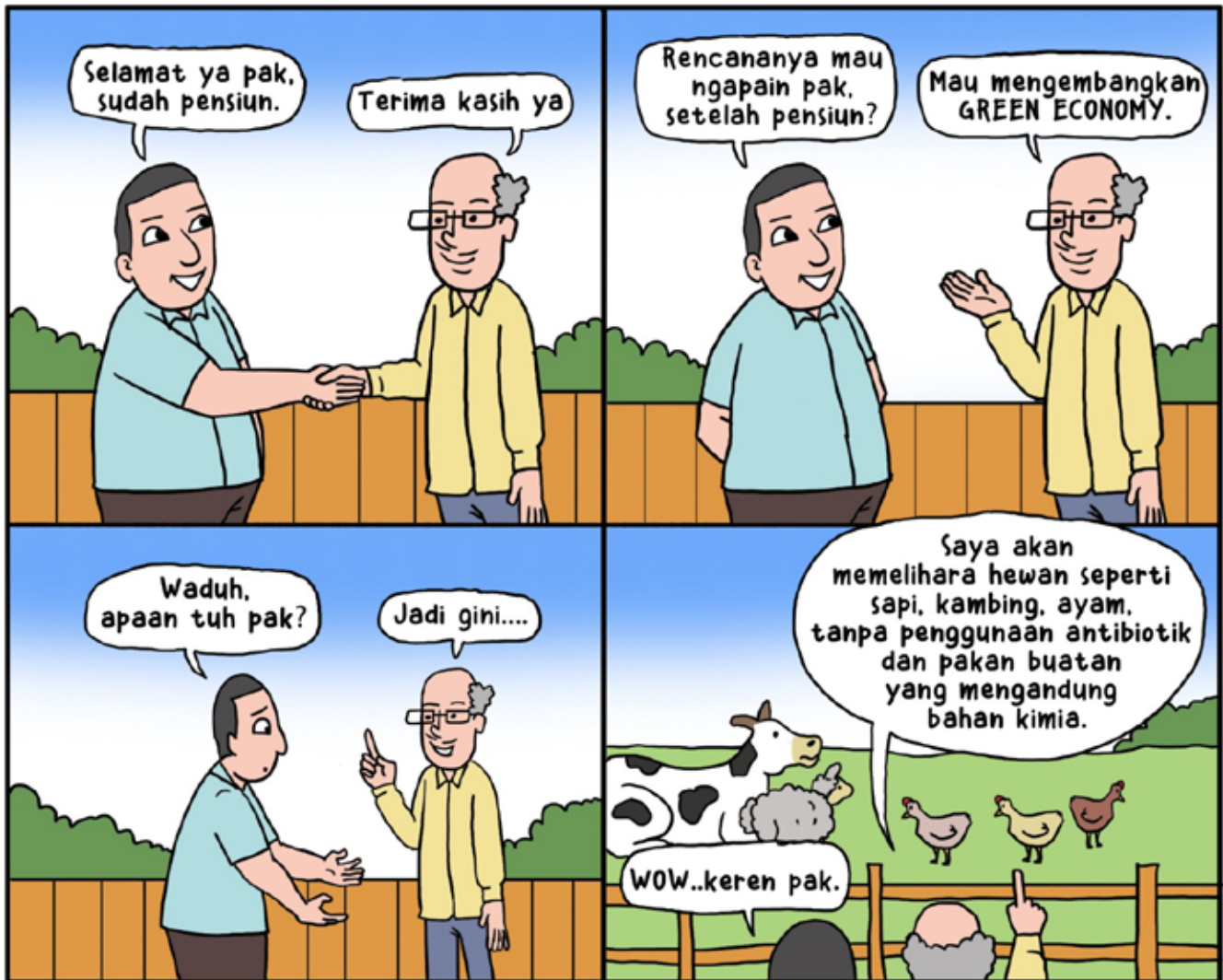


19



20

20
Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang menyerahkan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 26 Mei 2023.



KUIS

Dalam *Warta Pemeriksa* edisi sebelumnya, disampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi BPK dapat sejalan dengan pencapaian keberhasilan Renstra BPK.

Hal apa sajakah yang dimaksud dengan pencapaian keberhasilan renstra BPK tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

115TH
**SEMANGAT
UNTUK
BANGKIT!**



Selamat Hari Kebangkitan Nasional

20 MEI 2023



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



[BPKRI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2023

BERGERAK BERSAMA SEMARAKKAN MERDEKA BELAJAR



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri